PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG MAHAR SEBAGAI PATOKAN NAFKAH DALAM KELUARGA

(Studi Di Desa Kasembon Kecamatan Bululawang)

SKRIPSI

oleh:

Tazkia Nur Azalia

18210179

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG MAHAR SEBAGAI PATOKAN NAFKAH DALAM KELUARGA

(Studi Di Desa Kasembon Kecamatan Bululawang)

SKRIPSI

oleh:

Tazkia Nur Azalia

18210179

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG MAHAR SEBAGAI PATOKAN NAFKAH DALAM KELUARGA

(Studi Di Desa Kasembon Kecamatan Bululawang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 22 Maret 2022
Penulis,



Tazkia Nur Azalia
NIM 18210179

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Tazkia Nur Azalia. NIM 18210179. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG MAHAR SEBAGAI PATOKAN NAFKAH DALAM KELUARGA

(Studi Di Desa Kasembon Kecamatan Bululawang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 22 Maret 2022
Dosen Pembimbing,

Miftahuddin Azmi, M.HI
NIP. 198710182018020111157

PENGESAHAN SKIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Tazkia Nur Azalia NIM 18210179, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG MAHAR SEBAGAI PATOKAN NAFKAH DALAM KELUARGA

(Studi Di Desa Kasembon Kecamatan Bululawang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dewan Penguji:

1. **Faridatus Syuhadak, M.HI.** **NIP.197904072009012006**	(.....) **Ketua**
2. **Miftahuddin Azmi, M.HI.** **NIP. 198710182018020111157**	(.....) **Sekretaris**
3. **Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag.** **NIP.196009101989032001**	(.....) **Penguji Utama**

Malang, 25 Mei 2022

Dekan,

Scan Untuk Verifikasi

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً[1]

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.

[1] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sy9ma Creative Media Corp, 2014), 77

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas segala nikmat, rahmat dan pertolongan Allah SWT sehingga dapat terselesaikan dengan baik penulisan skripsi ini yang berjudul "Persepsi Masyarakat Tentang Mahar Sebagai Patokan Nafkah Dalam Keluarga (Studi Di Desa Kasembon Kecamatan Bululawang)." Shalawat serta salam kita panjatkan kepada Rasulullah SAW sebagai suri tauladanseluruh umat dan senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak dihari akhir.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari segala upaya dan bantuan, bimbingan maupunpengarahan dari hasil diskusi berbagai pihak. tidak ada yang bisa penulis berikan kecuali ucapan terima kasih dan hanya Allah yang bis membalas semua kebaikannya. Dengan itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Miftahuddin Azmi, M.HI., selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diluangkan untuk memberikan

bimbingan, arahan serta motivasi dalam mengerjakan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Khairul Umam, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan dukungan dari awal perkuliahan hingga saat ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pendidikan, pengajaran, dan bimbingan. Dengan keikhlasan niat dalam mengajar, semoga menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridla Allah SWT dan menjadi ilmu yang bermanfaat.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah berpartisipasi dalam membantu penyelesaian skripsi ini.
8. Para informan yang dengan ikhlas menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi demi keberlanjutan penelitian ini.
9. Orang tua penulis yang selalu mendo'akan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril, materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman penulis yang telah memberi semangat dan dukungan selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi yakni teman-teman Sambel bawang, Hafsha Squad, konco dulur, teman-teman Pondok Pesantren Al-Qur'an Nurul Huda Singosari, teman-teman Pondok Pesanten Sabilurrosyad.

11. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018, yang selalu memberikan dukungan serta semangat untuk berjuang bersama selama masa perkuliahan ini.
12. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam segi apapun sehingga skripsi ini terselesaikan, jazakallahu khairan.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya penulis pribadi. Semoga penulis dapat mengamalkan apa yang penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan menjadi bekal untuk kehidupan di akhirat. Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan, wawasan dari penulis. Penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan serta mengharapkan saran dan kritikan dari seluruh pihak demi upaya perbaikan diwaktu yang akan datang.

Malang, 22 Maret 2022
Penulis,

Tazkia Nur Azalia
NIM 18210179

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah memindahkan tulisan dalam bahasa Arab kedalam tulisan bahasa Indonesia, bukan terjemah dari bahasa Arab kebahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988.

A. Huruf Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Nama
ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	S	Es (dengan titik diatas)
ج	J	Je
ح	H {	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kh	Ka dan Ha
د	D	De
ذ	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	R	Er

ز	Z	Zet
س	S	Es
ش	Sy	Es dan Ye
ص	S̲	Es (dengan titik di bawah)
ض	T̲	De (dengan titik di bawah)
ط	Z̲	Zet (dengan titik di bawah)
ظ	‘	Apostrof Terbalik
ف	G	Ge
ق	F	Ef
ك	Q	Qi
ل	K	Ka
م	L	El
ن	M	Em
و	N	En
ه	W	We
أ/ء	H	Ha
ي	Y	Ye

Hamzah (Á) jika berada di awal kata, maka mengikuti huruf vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Akan tetapi jika Hamzah (Á) berada di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Huruf Vokal

Dalam bahasa Arab, huruf vokal sama seperti dalam bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal atau disebut dengan monoftong dan vokal rangkap atau disebut dengan atau diftong. Adapun vokal tunggal bahasa Arab dilambagkan dengan harokat, berikut transliterasinya:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fath*a*h	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَي	Fath*a*h dan Ya	Ai	A dan I
اَو	Fath*a*h dan Wau	Au	A dan U

Contoh:
اَي : *kaifa*
اَو : *haula*

C. Ta'marbuthah

Jika *ta' marbutah* hidup atau berharakat *fath*a*h, kasrah,* ataupun *dammah*, maka ditransliterasikan dengan "t", tapi jika *ta' marbutah* berada di akhir kalimat, mati, atau berharakat sukun, maka

ditransliterasikan dengan “h”, dan jika *ta’ marbutah* berada pada akhir kata dan diikuti kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta kedua

kata tersebut terpisah, maka transliterasinya menggunakan “h*”*. Contoh:

الرسالة المدرسة = *al risalah al-mudarrisah*

في رحمة الله = *fi rahmatillah*

D. Kata Sandang dan Lafdh al- Jalâlah

Kata sandang yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan alif lam ma’rifah (ال) dalam bahasa Indonesia baik yang diikuti dengan huruf qamariyah maupun syamsiyah ditransliterasikan dengan “al” ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Contohnya sebagai berikut:

1. Al-Imam Al- Bukhariy mengatakan…
2. Al- Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan…
3. Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
PENGESAHAN SKRIPSI iv
MOTTO v
KATA PENGANTAR vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ix
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR TABEL xv
ABSTRAK xvi
ABSTRACT xvii
التلخيص xviii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Definisi Operasional 6
F. Sistematika Penulisan 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9
A. PENELITIAN TERDAHULU 9
B. KERANGKA TEORI 13
1. *The Living Law* 13
2. Fiqih Munakahat 15

3. Mahar 18
4. Nafkah 34
BAB III METODE PENELITIAN 40
A. Jenis Penelitian 40
B. Pendekatan Penelitian 40
C. Lokasi Penelitian 41
D. Sumber Data 41
E. Metode Pengumpulan Data 43
F. Metode Pengolahan Data 44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 46
A. Gambaran Umum Desa Kasembon Kecamatan Bululawang 46
B. Alasan Masyarakat Mempertahankan Mahar Sebagai Patokan Nafkah Dalam Keluarga 51
C. Alasan Masyarakat Mempertahankan Persepsi Mahar Sebagai Patokan Nafkah Dalam Keluarga Perspektif The *Living Law* 58
BAB V PENUTUP 69
A. Kesimpulan 69
B. Saran 70
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Masyarakat Gagal Nikah 4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 10
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Kasembon 46
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Sesuai Tingkatan Pendidikan 47
Tabel 4.3 Jumlah Sarana Pendidikan 47
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Sesuai Jenis Pekerjaan 49
Tabel 4.5 Riwayat Pendidikan Informan 59
Tabel 4.6 Jenis Pekerjaan Informan 64

ABSTRAK

Tazkia Nur Azalia, NIM 18210179, 2022. **Persepsi Masyarakat Tentang Mahar Sebagai Patokan Nafkah Dalam Keluarga (Studi Di Desa Kasembon Kecamatan Bululawang)** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Miftahuddin Azmi, M.HI.

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Mahar, Nafkah

Mayoritas penduduk Desa Kasembon yang telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas langsung bekerja. Tak jarang juga pemuda tingkat Sekolah Menengah Pertama yang tidak melanjutkan pendidikannya, mereka memilih bekerja atau menikah. Sehingga mereka termasuk dalam taraf pendidikan rendah serta pemahaman agama yang kurang. Kurangnya pemahaman agama menjadikan masyarakat memiliki asumsi yang berbeda-beda. Masyarakat memiliki persepsi tentang mahar sebagai patokan nafkah dalam keluarga. Dampak dari pemahaman tersebut, terdapat masyarakat yang memilih membatalkan pernikahannya. Walaupun dampak dari pemahaman tersebut terdapat masyarakat yang memilih untuk membatalkan pernikahannya, mereka tetap mempertahankan persepsi tersebut hingga saat ini. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan alasan masyarakat Desa Kasembon mempertahankan persepsi mahar sebagai patokan nafkah dan untuk menganalisis alasan masyarakat mempertahankan persepsi tersebut menggunakan teori *Living Law*.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan proses pengolahan data menggunakan teknik pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini alasan masyarakat Desa Kasembon mempertahankan persepsi mahar sebagai patokan nafkah dalam keluarga adalah persepsi tersebut sudah menjadi tradisi dan budaya dari zaman nenek moyang mereka, memberikan motivasi suami untuk mencari nafkah dan sebagai jaminan pemberian nafkah yang layak. Faktor lain yakni kurangnya ilmu pengetahuan khususnya ilmu agama. Dalam teori *living law* atau hukum yang hidup di Desa Kasembon merupakan praktik dari persepsi mahar sebagai patokan nafkah pada hakikatnya tidak muncul dengan sendirinya, akan tetapi ada berdasarkan budaya dari nenek moyang yang berlaku secara turun temurun.

ABSTRACT

Tazkia Nur Azalia, NIM 18210179, 2022. **Perception Of Dowry As A Benchmark For Living In The Family (Study in Kasembon Village, Bululawang District)** Thesis. Islamic Family Law Departement, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Miftahuddin Azmi, M.HI.

Keywords: Public Perception, Mahar, Subsistence

The residents of Kasembon Village who have completed their high school education almost go straight to work and do not continue their higher education. There are even some junior high school youths who do not continue their education and choose to work or get married. This condition is prone to low education and lack of religious understanding. One of their lack of religious knowledge is evidenced by their understanding of the amount of living. Lack of understanding Religion makes people have different assumptions. Public have a perception of the dowry as a standard of living in the family. As a result of this understanding, there are people who choose to cancel their marriages Although the impact of this understanding is that there are people who choose to cancel the marriage, they still maintain the perception it until now.The purpose of this study is to analyze the reasons why the people of Kasembon Bululawang Village consider the amount of dowry as a standard of living and to analyze the amount of dowry as a standard of living from The Living Law.

This research is an empirical research or field research with a qualitative research approach. The sources of data used are interviews and documentation. While the data processing using data inspection techniques, classification, verification, analysis, and conclusions.

The results of this study are the reasons the people of Kasembon Village maintain The perception of dowry as a benchmark for living in the family is that perception has become a tradition and culture from the time of their ancestors, giving husband's motivation to earn a living and as a guarantee for providing a living worthy. Another factor is the lack of knowledge, especially science religion. In the theory of living law or the law that lives in Kasembon Village is the practice of the perception of dowry as a standard of living in essence does not appear by itself, but exists based on the culture of grandmothers ancestors that are passed down from generation to generation.

المخلص

تزكية نور أزلية. رقم القيد ١٨٢١٠١٧٩, ٢٠٢٢. **التصور العام عن ماهر كمعيار لكسب العيش في الأسرة (الدراسة في قرية كاسمبون بمقاطعة بولولاوانج)**. بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: مفتاح الدين عزمي، الماجستي

الكلمات الأساسية: التصور العام ، مهر، معيشة

معظم السكان في قرية كاسمبون الذين أكملوا تعليمهم الثانوي يذهبون مباشرة إلى العمل ولا يواصلون تعليمهم إلى المستوى الأعلى. بل إن هناك بعض الشباب في مرحلة المتوسطة الذين لا يكملون تعليمهم و يختارون العمل أو الزواج. هذه الحالة عرضة لانخفاض التعليم و الفهم الديني. يتضح أحد افتقارهم إلى المعرفة الدينية من خلال فهمهم لمقدار المعيشة . عام لديهم تصور للمهر على أنه مستوى معيشي في الأسرة. نتيجة لهذا الفهم ، هناك أشخاص يختارون إلغاء زيجاتهم. على الرغم من أن تأثير هذا الفهم هو أن هناك أشخاصًا يختارون لإلغاء الزواج ، لا يزالون يحافظون على التصور حتى الآن. الغرض من هذه الدراسة هو وصف الأسباب يحافظ سكان قرية كاسيمبون على مفهوم المهر كمعيار معيشة ولتحليل أسباب تمسك الناس بالتصورات يستخدم نظرية القانون الحي.

هذا البحث هو بحث تجريبي أو ميداني مع منهج البحث الكيفي. أما مصادر البيانات المستخدمة هي المقابلات و التوثيق و عملية معالجتها باستخدام طريقة فحص البيانات و التصنيف و التصديق و التحليل و الاستنتاجات.

نتائج هذه الدراسة هي الأسباب التي دفعت سكان قرية كاسيمبون إلى الحفاظ عليها إن تصور المهر كمعيار للعيش في الأسرة هو هذا التصور أصبح تقليدًا وثقافة من زمن أسلافهم ، العطاء دافع الزوج لكسب العيش وكضمان له ذو قيمة.عامل آخر هو نقص المعرفة ، وخاصة العلم دين. في نظرية القانون الحي أو القانون السائد في قرية كاسيمبون هي ممارسة تصور المهر كمستوى معيشي في الجوهر لا يظهر من تلقاء نفسه ، ولكنه قائم على ثقافة الجدات أسلاف تنتقل من جيل إلى جيل.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahar merupakan sebuah simbol pemuliaan wanita dengan tujuan sebagai penghargaan karena seorang wanita setuju untuk melangsungkan prosesi pernikahan. Pada zaman jahiliyah wanita sangat disia-siakan dan tidak diberikan hak sedikitpun. Bahkan hartanya digunakan semena-mena tanpa diberi kesempatan untuk mengurus serta menggunakan hartanya. Kemudian Islam datang mewajibkan calon suami untuk memberikan mahar kepada calon istri, bukan ayah maupun orang terdekatnya. sehingga tidak diperbolehkan seorangpun menggunakan sedikit mahar tanpa persetujuannya.[2]

Mahar secara bahasa menurut *fiqih munakahat* disebut *shadaq* atau *nihlah*. Adapun secara istilah, mahar adalah suatu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri, sebagai tanda ketulusan hati agar timbul rasa cinta kasih calon istri kepada calon suaminya. Mahar juga bisa disebut sebagai penghargaan calon suami terhadap calon istri karena calon istri mau melangsungkan pernikahan dengannya.[3]

Mengenai dalil penunaian mahar sudah disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

[2] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Terjemah: Moh Thalib*, (Bandung: Alma Arif, 1990), 52.
[3] Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta : Prenadamedia, 2003), 84.

> *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."*[4]

Kedudukan mahar sangat penting dalam pernikahan, namun ulama' berpendapat bahwa mahar tidak masuk dalam rukun pernikahan.[5] Tujuan diwajibkannya mahar yakni untuk menunjukkan kesungguhan suami dalam menikahi istri dan juga sebagai lambang cinta dan kasih sayang.[6] Adanya kewajiban suami memberi mahar, menunjukkan bahwa Islam menilai wanita sebagai makhluk yang pantas untuk dihargai dan mempunyai hak untuk memiliki harta.

Di Indonesia mayoritas menganut madzhab Imam Syafi'i. Adapun mengenai besaran mahar menurut pendapat Imam Syafi'i, tidak ada batasan minimal mahar yang diberikan calon suami kepada kepada calon istri. Oleh karena itu, calon istri tidak boleh menuntut calon suaminya untuk memberikan mahar yang besar nilainya. Walaupun mahar itu wajib, namun dalam penentuan besarnya mahar tetap harus menyesuaikan dengan kemampuan suami atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Calon istri sebaiknya tidak menjadikan ketidaksanggupan dalam membayar mahar menjadi penghalang berlangsungnya pernikahan. Sejatinya mahar merupakan wasilah, bukan tujuan utama dalam menikah. Oleh karena itu,

---

[4] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sy9ma Creative Media Corp, 2014), 77

[5] Muhammad Zuhaily, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Madzhab Syafi'i, terj. Mohammad Kholiso*, (Surabaya: CV. Imtiyaz, 2013), 235.

[6] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 124.

hal yang terpenting yakni suami memberikan istri mahar yang memiliki nilai dan halal.

Kemudian mengenai konsep mahar menurut Kompilasi Hukum Islam, yakni pemberian suami kepada istri yang batasan jumlah dan bentuknya diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak.[7] Kesepakatan yang dimaksud, disesuaikan menurut adat masyarakat di daerahnya. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan mengenai konsep mahar yang dijadikan adat kebiasaan oleh masyarakat.

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman suku budaya sehingga menjadikan pemahaman, pelaksanaan perkawinan sangat bervariasi. Banyaknya keragaman suku budaya di Indonesia, Undang-undang tidak mungkin mengakomodir seluruh adat, hukum dan kebiasaan di setiap daerah. Maka aturan teknis diserahkan kepada masyarakat untuk melaksanakan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.[8]

Desa Kasembon merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bululawang. Mayoritas penduduk desa berprofesi sebagai petani, namun tak jarang juga ada yang berprofesi pedagang dan buruh pabrik. Adapun pemuda yang telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas mayoritas langsung bekerja. Tak jarang juga pemuda tingkat Sekolah Menengah Pertama yang tidak melanjutkan pendidikannya, mereka memilih bekerja atau menikah. Sehingga mereka

[7] Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam
[8] Medi Ardiyansyah, *"Konsep Mahar Dalam Pandangan Masyarakat Kota Sulubussalam (Studi Kasus Di Kecamatan Simpang Kiri)", Jurnal Taushiah FAI UISU,* no. 1(2021), 35 https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tsh/article/download/3991/2890

termasuk dalam taraf pendidikan rendah serta pemahaman agama yang kurang. Kurangnya pemahaman agama menjadikan masyarakat memiliki asumsi yang berbeda-beda. Berdasarkan penelitian, banyak pasangan gagal menikah yang terjadi di Desa Kasembon khususnya yang berada di RW. 01, RW. 02 dan RW. 03. Berikut akan dipaparkan jumlah pasangan yang gagal menikah karena menganggap jumlah mahar sebagai patokan nafkah.

Tabel 1.1
Jumlah Pasangan Batal Nikah

Bulan	Jumlah Pasangan Batal Nikah Tahun 2021			Jumlah
	RW. 01	RW. 02	RW. 03	
Agustus	2	2	1	5
September	1	2	1	4
Oktober	1	3	1	5
November	3	1	2	6

Dari tabel di atas, banyak pasangan gagal menikah yang terjadi di Desa Kasembon utamanya di RW. 01, RW. 02 dan RW. 03. Masyarakat memiliki persepsi bahwa mahar menjadi patokan nafkah dalam keluarga. Adanya pembatalan perkawinan disebabkan jumlah mahar yang dianggap kecil oleh pihak calon istri. Pihak wali khawatir calon suami dari anaknya tidak bisa memberi nafkah karena mahar yang diberikan terlalu kecil. Walaupun demikian, pemahaman masyarakat mengenai mahar sebagai patokan nafkah tetap dipertahankan hingga saat ini. Berdasarkan fakta diatas, peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian mengenai persepsi masyarakat tentang mahar sebagai patokan nafkah dalam keluarga dan mengaitkannya dengan teori *living law*.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa masyarakat Desa Kasembon Kecamatan Bululawang mempertahankan persepsi mahar sebagai patokan nafkah dalam keluarga?
2. Bagaimana alasan masyarakat mempertahankan persepsi mahar sebagai patokan nafkah dalam keluarga ditinjau dengan teori *living law*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan alasan masyarakat Desa Kasembon Bululawang mempertahankan persepsi mahar sebagai patokan nafkah dalam keluarga
2. Menganalisis alasan masyarakat mempertahankan persepsi mahar sebagai patokan nafkah dalam keluarga ditinjau dengan teori *living law*

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat yakni manfaat praktis dan manfaat aplikatif.

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta wawasan bagi masyarakat mengenai persepsi mahar sebagai patokan nafkah dalam keluarga serta menambah kebijakan selanjutnya agar mengurangi adanya pembatalan perkawinan.

2. Manfaat Aplikatif

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan peneliti mengenai persepsi mahar sebagai patokan nafkah dalam keluarga serta menambah konsep pengetahuan. Sehingga nantinya dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya apabila ada kasus yang serupa.

E. Definisi Operasional

1. Mahar menurut Kompilasi Hukum Islam yakni pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik bentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[9]
2. Nafkah adalah kewajiban seorang suami untuk memenuhi keluarga dalam hal sandang, pangan, papan dan disesuaikan kebutuhan masing-masing.[10]
3. *The living law* adalah hukum yang hidup dan sedang aktual dalam suatu masyarakat, sehingga tidak membutuhkan upaya reaktualisasi lagi.

[9] Pasal 1(d) Kompilasi Hukum Islam
[10] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), 421

4. *Fiqih munakahat* adalah hukum, peraturan yang mengatur tata cara perkawinan beserta hal-hal yang timbul karena adanya perkawinan.[11] Umumnya *fiqih munakahat* diartikan sebagai ilmu hukum Islam yang menyangkut masalah perkawinan.

F. Sistematika Penulisan

Peneliti menguraikan menjadi lima bab guna memperoleh gambaran secara garis besar dari penelitian ini.

Pada bab I berisi tentang pendahuluan. Dalam pendahuluan terdapat penjelasan ringkas mengenai penelitian. Isi dalam pendahuluan adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang berisi gambaran secara umum mengenai laporan penelitian yang dibahas.

Pada bab II berisi tentang tinjauan pustaka dimana dalam tinjauan pustaka berisi tentang penelitian terdahulu sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian kerangka teori yang berisikan tinjauan umum yang dibahas tentang jumlah mahar sebagai patokan nafkah.

Metode penelitian terdapat pada bab III. Pada metode penelitian berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, metode pengolahan data serta konklusi. Metode penelitian berfungsi untuk

[11] Dr. M. Dahlan R, *Fikih Munakahat,* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015), 5

mengarahkan penulis agar mudah melanjutkan penelitian dengan mengetahui metode yang tepat untuk digunakan dalam penelitian.

Pada bab IV berisikan tentang data-data yang telah diperoleh dari sumber data yang dilanjut dengan proses analisis sehingga menghasilkan jawaban dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Penutup berada pada bab V yang berisikan kesimpulan serta pemaparan singkat mengenai jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin-poin. Bab ini juga berisikan saran-saran yang memuat anjuran akademik bagi lembaga maupun peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu, peneliti memaparkan tentang perbedaan dan persamaan penelitian yang dilakukan terhadap penelitian sebelumnya. Berikut penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan tema peneliti yakni:

1. Implikasi Pembatalan Khitbah Terhadap Mahar *"Mee Ranup"* Perspektif Fiqh (Studi di Desa Cot Jabet Kc. Banda Baro Kab. Aceh Utara)[12]

   Pada penelitian terdahulu, mahar menjadi objek yang dipengaruhi sedangkan penelitian ini mahar menjadi faktor penyebabnya sehingga persamaannya terletak pada kesamaan dalam meneliti mahar. Persamaan penelitian juga terletak pada penelitian empiris. Perbedaannya hanya pada tempat yang diteliti, yakni penelitian terdahulu meneliti pembatalan khitbah terhadap mahar sedangkan penelitian ini meneliti mahar yang menjadi sebab pembatalan perkawinan.

2. Tradisi *Belis* Dalam Mahar Ditinjau Dari Fiqh Syafi'i (Studi Di Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat)[13]

[12]Husnul Khatimah, *Implikasi Pembatalan Khitbah Terhadap Mahar "Mee Ranup" Perspektif Fiqh (Studi di Desa Cot Jabet Kc. Banda Baro Kab. Aceh Utara)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015) . http://ethesis.uin-malang.ac.id/10486/

Persamaan dengan penelitian terdahulu terdapat pada pemahaman atau tradisi masyarakat mengenai mahar. Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama menggunakan jenis penelitian lapangan. Persamaan yang lain yakni terdapat pihak yang merasa keberatan dengan adanya tradisi tersebut. Pada penelitian terdahulu meninjau tradisi masyarakat menggunakan fiqh Syafi'i, sedangkan penelitian ini meninjau menggunakan teori *living law*.

3. Konsep Mahar Dalam Pandangan Masyarakat Kota Sulubussalam (Studi Kasus Di Kecamatan Simpang Kiri)[14]

   Pada penelitian terdahulu, terdapat persamaan yakni meneliti tentang pandangan masyarakat mengenai konsep mahar. Adapun penelitian terdahulu lebih fokus kepada konsep mahar dalam pandangan masyarakat Sulubussalam. Penelitian ini meneliti persepsi masyarakat mengenai mahar dan ditinjau dengan teori *living law*.

4. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi *Doi' Panai'* dalam pernikahan adat suku Makassar Perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah* (Studi di Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros)[15]

---

[13] M Solekhudin Al-Ayubi, *Tradisi Belis Dalam Mahar Ditinjau Fiqh Syafi'i I (Studi Di Kota Wikabubak Kabupaten Sumba Barat),* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018) http://ethesis.uin-malang.ac.id/12927/

[14] Medi Ardiyansyah, *"Konsep Mahar Dalam Pandangan Masyarakat Kota Sulubussalam (Studi Kasus Di Kecamatan Simpang Kiri)",* 1

[15] Ahmad Muhajir, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi Doi' Panai' dalam pernikahan adat suku Makassar Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi di Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros),* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017) . http://ethesis.uin-malang.ac.id/9371/

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini yakni meneliti tentang pemahaman dan pandangan masyarakat terhadap mahar. Pada penelitian terdahulu mengkaji melalui perspektif *al-maslahah al-mursalah*, sedangan penelitian ini mengkaji dengan teori *living law*. Dalam penelitian terdahulu meneliti di Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros sedangkan penelitian ini di Desa Kasembon Kecamatan Bululawang. Maka inilah yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti dan Asal instansi	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Husnul Khatimah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2015)	Implikasi Pembatalan Khitbah Terhadap Mahar *"Mee Ranup"* Perspektif Fiqh (Studi di Desa Cot Jabet Kc. Banda Baro Kab. Aceh Utara)"	Kesamaan meneliti tentang mahar dan pembatalan	Penelitian terdahulu meneliti pembatalan khitbah terhadap mahar sedangkan penelitian ini meneliti pembatalan nikah akibat mahar.
2	M Solekhudin Al-Ayubi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2018)	Tradisi *Belis* Dalam Mahar Ditinjau Dari Fiqh Syafi'i (Studi Di Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat)	Kesamaan penelitian yakni meneliti tradisi mahar, terdapat pihak yang merasa	Perbedaannya yakni pada penelitian terdahulu fokus pada tradisi mahar yang ditinjau menggunakan

			keberatan dengan adanya tradisi tersebut.	Fiqh Syafi'i sedangkan penelitian ini fokus meneliti persepsi mahar masyarakat Desa Kasembon yang ditinjau dengan teori *living law*
3	Medi Ardiansyah, Universitas Islam Sumatera Utara (2021)	Konsep Mahar Dalam Pandangan Masyarakat Kota Sulubussalam (Studi Kasus Di Kecamatan Simpang Kiri)	Kesamaan dalam meneliti tentang pandangan masyarakat mengenai konsep mahar.	Dalam penelitian terdahulu fokus kepada konsep mahar dalam pandangan masyarakat Sulubussalam, sedangkan penelitian ini fokus kepada pemahaman masyarakat Desa Kasembon tentang mahar
4	Ahmad Muhajir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2017)	Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi *Doi' Panai'* dalam pernikahan adat suku Makassar Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi di Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros)	Kesamaan membahas tentang pemahaman dan pandangan masyarakat terhadap mahar	Penelitian terdahulu mengkaji melalui perspektif *al-maslahah al-mursalah*, sedangan penelitian ini mengkaji dengan teori *living law*. Kemudian mengenai tempat penelitian. Penelitian terdahulu melakukan penelitian di Desa Salenrang

				Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros sedangkan penelitian ini di Desa Kasembon Kecamatan Bululawang

B. Kerangka Teori

1. Teori *Living Law*

Menurut Soepomo hukum adat adalah hukum yang hidup (*the living law*), karena ia menjelmakan perasaan hidup yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya, hukum adat terus menerus tumbuh dan berkembang seperti masyarakat sendiri.[16] Hukum adat merupakan istilah teknis ilmiah, yang menunjukkan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat yang tidak berbentuk peraturan-perundangan yang dibentuk oleh penguasa pemerintahan. Beberapa definisi hukum adat yang dikemukakan para ahli hukum, antara lain yaitu[17]

a) Menurut Soerjono Soekanto

Hukum adat pada hakikatnya adalah hukum kebiasaan yang mempunyai akibat hukum, dan merupakan perbuatan yang diulang-

[16] Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*,(Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1991),8.
[17] Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*,(Bandung:PT. Refika Aditama, 2010),4-6.

ulang dalam bentuk yang sama menuju pada "*rechtsvardigeordening der samenlebing*".

b) Menurut Hardjito Notopuro

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dan merupakan kebiasaan dengan ciri khas tersendiri dan menjadi pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.

Dari seluruh pengertian di atas dapat diketahui *the living law* adalah hukum yang hidup dan sedang aktual dalam suatu masyarakat, sehingga tidak membutuhkan upaya reaktualisasi lagi. *The living law* bukan sesuatu yang statis, tetapi terus berubah dari waktu ke waktu. *The living law* adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat, bisa tertulis bisa juga tidak. Secara sosiologis, *the living law* senantiasa akan hidup terus dalam masyarakat. *The living law* merupakan aturan-aturan yang digunakan di dalam hubungan-hubungan kehidupan yang sedang berlangsung dan bersumber dari adat istiadat atau kebiasaan.

Menurut Djojodigoeno, dalam dimensi hukum adat mengandung dua dimensi, yaitu dimensi formal dan materiil. Dalam dimensi formal hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan dimensi materialnya hukum adat adalah sistem norma yang mengekspresikan perasaan keadilan masyarakat.[18]

[18] Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*,(Yogyakarta:Penerbit Teras, 2008), 18.

Dari pendapat para tokoh di atas, hukum adat merupakan norma-norma atau peraturan-peraturan yang hidup dalam masyarakat yang tidak tertulis, akan tetapi ditaati dan dipatuhi apabila tidak mengikuti peraturan tersebut maka mendapatkan sanksi.

2. Fiqih Munakahat

Fiqih munakahat berasal dari kata fiqih dan *munakahat*. Fiqih berasal dari kata *faqiha yafqohu* yang berarti paham.[19] Fiqih menurut pandangan Jalalul Mahalli yakni pengetahuan mengenai hukum *syara'* yang bersifat *'amali* yang diperoleh dari dalil-dalil yang di*tafshili.*[20] Fiqih yang dimaksud yakni bentuk dari ilmu pengetahuan yang lahir, berdiri sendiri dan memiliki metodologi sendiri.[21] Dapat disimpulkan bahwa fiqih adalah seperangkat ilmu pengetahuan yang diambil dari Al-Qur'an maupun sunnah yang menghasilkan suatu hukum bagi umat Islam.

Sementara *munakahat* berasal dari *nakaha yankihu* yang memiliki arti sama dengan *tazawwaja* yakni nikah.[22] Kata *nakaha* banyak dijumpai dalam Al-Qur'an seperti dalam surat An-Nisa' ayat 3, yakni

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ

[19] Louis ma'luf, *al munjid fi al lughoh wa al a'lam*, (Beirut: Dar al Masyriq, 1987), 591.
[20] Muhammad Hasby Ash Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 25.
[21] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 2.
[22] M. Dahlan R, *Fikih Muqkahat*, 3.

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.[23]

Adapun kata *zawwaja* juga terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 37, yakni

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيۡدٞ مِّنۡهَا وَطَرٗا زَوَّجۡنَٰكَهَا لِكَيۡ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ حَرَجٞ فِيٓ أَزۡوَٰجِ أَدۡعِيَآئِهِمۡ

Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka.[24]

Menurut pendapat Wahbah Zuhaily, jika dalam al-Qur'an atau hadits terdapat lafadz nikah tanpa diikuti indikator apapun maka nikah bermakna bersetubuh.[25] Seperti dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 22 yakni:

وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ...

[23] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, 77.
[24] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, 42.
[25] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh,* vol 9, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), 6514.

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.."[26]

Hal ini berbeda dengan pendapat ulama' ahli fiqih yang berpendapat bahwa makna nikah adalah akad. Imam Syafi'i dan Imam Maliki memiliki beberapa argumen untuk memperkuat pendapat kedua yakni[27]

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ...

"Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan.." [28]

لاَنِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَ شُهُوْدٍ[29]

"Tidak ada pernikahan tanpa wali dan saksi-saksi"

Adapun kata nikah dalam ayat di atas tidak cocok untuk dimaknai sebagai bersetubuh akan tetapi dimaknai sebagai akad. Dalam hadits juga demikian, apabila dimaknai sebagai bersetubuh maka tidak mungkin seseorang yang bersetubuh harus mendatangkan wali dan saksi maka kata nikah sudah jelas bermakna akad.

---

[26] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, 81
[27] Abdur Rahman Aljazairi, *Al Fiqh Madzahib Al Arba'ah Juz 4,* (Bairut: Darul Fikr: 2011), 7.
[28] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, 354.
[29] Syaikh Muwafiquddin Ibnu Qudamah, Al-Mughni Jilid 6, (Beirut: Dar Alamul Kutub, 1997), 448.

Imam Hanafi memiliki yang sama dengan Wahbah Az-Zuhaili yang memaknai nikah dengan bersetubuh. Alasan pemaknaan nikah dengan bersetubuh diambil dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ

"Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain…"[30]

Dari ayat di atas, nikah bermakna bersetubuh karena yang dimaksudkan adalah bersetubuh.[31] Apabila fiqih digabungkan dengan munakahat berarti memiliki makna pengetahuan, aturan mengenai tata cara pernikahan serta apa yang timbul dengan adanya pernikahan. Singkatnya *fiqih munakahat* dimaknai sebagai ilmu hukum Islam yang menyangkut masalah perkawinan.[32]

3. Mahar

a. Mahar Menurut Hukum Islam

1) Pengertian Mahar

Mahar secara bahasa yaitu maskawin. Sedangkan menurut istilah mahar adalah suatu pemberian dari calon suami kepada

[30] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, 36.
[31] Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), 4.
[32] Pius A Partanto dan M Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 177.

calon istri dengan adanya pernikahan. [33] Mahar sendiri memiliki arti pemberian bagi seorang wanita disebabkan terjadinya suatu akad.[34] Pengertian mahar menurut Sayyid Sabiq yakni pemberian suami kepada istri dengan maksud menyenangkan hati dan sebagai tanda keridhoan terhadap kekuasaan suami atasnya.[35] Mahar juga bermakna pemberian suami kepada istri yang bersifat wajib guna menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang istri terhadap suaminya dalam lingkup pernikahan.[36]

Ulama' fiqh juga menyebut mahar dengan *shadaq, nihlah* dan *faridhah.*[37] Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar merupakan suatu kewajiban bagi laki-laki untuk memberikan kepada perempuan agar dapat menguasai seluruh tubuhnya.[38]Islam mengangkat kedudukan wanita dengan menjadikan mahar sebagai hak wanita. Wanita yang sudah menerima mahar, ia rela laki-laki tersebut menjadi pemimpinnya. Apabila meninggikan kadar mahar akan mempersulit pernikahan keduanya, maka hal ini tidak diperbolehkan.

2) Dasar Hukum

Perempuan diberi kehormatan dengan adanya kewajiban suami untuk memberikan mahar kepadanya. Mahar murni

[33] Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia: 2013), 260.
[34] Isnan Ansory, *Fiqih Mahar*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 9
[35] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Ummul Quro, 2014), 220.
[36] Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Pernikahan,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 81.
[37] Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* 81.
[38] Aljazairi, *Al Fiqh Madzahib Al Arba'ah Juz 4*, 94.

diberikan kepada istri, istri pula yang berhak menerima. Tidak ada seorangpun yang diperbolehkan untuk memakai mahar kecuali mendapatkan keikhlasan serta ridho dari istri.[39] Mengenai perintah kewajiban membayar mahar telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 24:

وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا

> *"Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana"*[40]

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيْدٍ (رواه البخاري)[41]

[39] Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 218 .
[40] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid*, 82.
[41] Al-Bukhary, *Shahih al-Bukhary*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1990), 120.

> *Telah menceritakan kepada kami Yahya telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Abi Hazim dari Sahl bin Sa'd bahwasanya; Nabi SAW bersabda kepada seseorang "menikahlah meskipun maharnya hanya dengan cincin besi"*

Jumhur ulama berpendapat bahwa mahar bukan termasuk rukun dan juga bukan termasuk syarat pernikahan.[42] Adapun Imam Malik berpendapat bahwa mahar termasuk dalam rukun pernikahan. Dasar yang dijadikan pedoman oleh jumhur ulama yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةًۖ وَّمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُه وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُه مَتَاعًابِالْمَعْرُوْفِۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ

> *Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.*[43]

Pada ayat diatas disebutkan bahwa suami istri yang belum berhubungan kemudian jatuh talak maka talak tetap sah. Begitupun mahar, walaupun belum menentukan mahar, nikah tetap sah berdasarkan ayat diatas. Dapat disimpulkan bahwa mahar bukan termasuk dalam rukun ataupun syarat pernikahan.[44] Pada ayat

[42] Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam,* 31.
[43] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid,* 38.
[44] A-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh,* vol 9, 6761.

tersebut juga mengandung pernyataan bahwa mahar bukan suatu yang harus disebutkan saat akad. Kewajiban pemberian mahar suami kepada istri dilandaskan dengan tidak adanya hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah pernah meninggalkan mahar walaupun hanya satu kali, maka hal ini menjadi suatu kewajiban.

3) Kadar Mahar

Ukuran mahar yang akan diberikan kepada calon istri ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak guna adanya saling kerelaan dan keikhlasan diantara keduanya. Akan tetapi calon istri memiliki wewenang yang besar dalam menentukan jumlah mahar kepada calon suami atau walinya.[45] Oleh karena itu, mahar yang diberikan harus sesuai dengan perjanjian yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh kedua belah pihak. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 25

فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ أٰتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْف

Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya (wali) dan berilah mereka maskawin yang pantas[46]

Ayat di atas menunjukkan bahwa mahar dapat ditentukan besar dan jenisnya. Mengenai jumlah mahar, islam tidak memberikan jumlah minimal maupun jumlah maksimal. Dalam nash dijelaskan tentang pentingnya mahar, bukan menentukan

[45] Abdul Rohman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 1996), 74.
[46] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, 82.

besaran mahar sebagai patokan baiknya sebuah mahar. Oleh karena itu, islam memberi kebebasan mengenai jumlah mahar sesuai dengan batas kemampuan, karena banyaknya perbedaan serta keadaan rezeki dari setiap orang. Selama tradisi tidak menyimpang dengan hukum islam maka diperbolehkan. Dalam hadits Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَامِرِبْن رَبِيْعَةَ اَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةً تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْه و سلّم : أَرَضِيْتُ عَلَى نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ فَقَالَتْ : نَعَمْ, فَأَ جَا زَهُ (رواه احمد وابن ماجه والترمذى وصححه)[47]

> *Dari 'Amir bin Rabi'ah : Sesungguhnya seorang perempuan dari bani Fazaroh kawin dengan maskawin sepasang sandal. Rosulullah SAW bertanya kepada perempuan tersebut : Relakah engkau dengan maskawin sepasang sandal? Perempuan itu menjawab : Ya, akhirnya Rosulullah SAW meluluskannya.*

Dalam dua hadits di atas sudah jelas bahwa mahar ditentukan oleh kedua belah pihak dan adanya kerelaan keduanya. Pentingnya mahar juga diungkap jelas oleh Rasulullah dimana dalam hadits disebutkan bahwa perintah menikah walau dengan mahar cincin dari besi.

Mahar adakalanya berupa jasa seperti yang terjadi pada masa Nabi Musa AS. Nabi Musa membayar mahar dengan bentuk

[47] Imam Abu Abdurrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali An Nasai, *Sunan An Nasai*, (Depok: Gema Insani, 2017), 214.

bekerja kepada mertuanya. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al Qashas ayat 27

قَالَ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنۡ أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَيَّ هَٰتَيۡنِ عَلَىٰٓ أَن تَأۡجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٖۖ فَإِنۡ أَتۡمَمۡتَ عَشۡرٗا فَمِنۡ عِندِكَۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أَشُقَّ عَلَيۡكَۚ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ

"Dia (Syeikh Madyan) berkata, Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik."[48]

Mahar yang disebut dalam ayat diatas menunjukkan bahwa mahar dapat berupa jasa. Jasa yang dimaksud dalam ayat tersebut sebagaimana yang terjadi pada masa Nabi Musa yakni mahar berupa bekerja. Bekerja menjadikan manfaat yang kemudian manfaat tersebut dijadikan mahar.

Terdapat hadits yang menjelaskan bahwa jasa dari pengajaran Al-Qur'an dapat dijadikan mahar Ulama bersepakat bahwa mahar yang berupa hafalan Al-Qur'an berupa jasa, yakni suami mengajarkan kepada istrinya. Namun ulama berbeda pendapat mengenai jasa pengajaran Al-Qur'an apakah bernilai harta sehingga dapat djadikan mahar.[49] Pendapat Imam Nawawi

[48] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid,* 388.
[49] Ansory, *Fiqih Mahar*, 33.

dalam hal ini membolehkan pengajaran Al-Qur'an sebagai mahar dan mengkategorikan hal tersebut sebagai sesuatu yang bernilai harta.[50] Selain itu jumhur ulama juga menjadikan jasa pengajaran Al-Qur'an suatu kebolehan untuk dijadikan sebagai mahar dengan memberi persyaratan.[51] Pertama, adanya penetapan tentang materi yang diajarkan, seperti jumlah ayat atau surat. Begitupun waktu dalam mengajarkan ayat tersebut. Kedua, ayat yang akan diajarkan kepada istri merupkan ayat yang memang istri belum menguasai ayat tersebut. Sehingga suami dibebani dengan usaha untuk mengajarkan kepada istrinya. Pada dasarnya *fiqih munakahat* mensyaratkan sesuatu yang dijadikan mahar adalah dalam bentuk materi, hal ini menurut kesepakatan ulama.[52] Akan tetapi jika memang suami benar-benar tidak memiliki materi maka diperbolehkan memberi mahar berupa jasa.[53]

Para ulama ahli fiqih bersepakat bahwa jumlah maksimal mahar tidak ditentukan, adapun mereka berbeda pendapat mengenai jumlah minimal mahar. Ibnu Taimiyah berkata bahwa laki-laki kaya yang mampu secara finansial boleh memberikan mahar dalam jumlah besar kepada perempuan yang akan

[50] Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Minhaj Syarah Shahih Muslim bin al-Hajjaj*, (Beirut, Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2012), 214
[51] Ansory, *Fiqih Mahar*, 34

[52] Ansory, *Fiqih Mahar*, 24
[53] Rusydaya Bashri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta: CV Kaaffah Learning Center, 2019), 93

dinikahinya.[54] Menurut pendapat Imam Syafi'i tidak ada batas minimal mahar. Selama sesuatu yang dijadikan mahar memberikan harga bagi sesuatu yang lain, maka boleh dijadikan mahar. Ibnu Wahb dari kalangan Imam Malik juga mengemukakan pendapat yang sama dengan Imam Syafi'i.[55]

Imam Malik berkata dalam kitab *Al Muwatta* bahwa Imam Malik tidak setuju apabila wanita dinikahi dengan mahar yang kurang dari seperempat dinar, karena seperempat dinar merupakan jumlah terendah untuk had pemotongan tangan sebab mencuri. Disisi lain Imam Hanifah memiliki pendapat paling sedikitnya mahar adalah sepuluh dirham. Disebutkan pula dalam riwayat lain lima dirham dan ada juga yang menyebutkan empat puluh dirham.[56] Berbedanya pendapat para imam mazhab mengenai mahar, semata sebagai bentuk penghormatan, kemuliaan kepada perempuan.

4) Syarat-syarat Mahar

Sebelum menentukan mahar yang akan diberikan kepada calon istri, calon suami hendaknya memperhatikan syarat-syarat mahar. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

a) Benda atau harta berharga

---

[54] Bagir Muhammad, *Fiqih Praktis II Menurut Al-Qur'an As Sunnah dan Pendapat Para Ulama'*, (Jakarta: Karisma, 2009), 131.
[55] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah Al Muqtashid Juz 2*, (Semarang: Toha Putra, t.t), 386.
[56] Jawad Mughniyyah Muhammad, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2004), 364.

Mahar memang tidak ditentukan nilainya akan tetapi barang atau benda yang dijadikan mahar harus barang berharga. Ketika mahar yang diberikan tidak bernilai atau tidak berharga maka tidaklah sah mahar tersebut. Mahar yang diberikan sedikit akan tetapi berharga, maka tetap diperbolehkan atau sah.

b) Barang suci dan bermanfaat

Barang yang dijadikan mahar harus suci, apabila barang tersebut najis seperti khamr tidak boleh dijadikan mahar. Begitupun mahar harus bermanfaat maka tidak boleh memberikan mahar berupa barang yang tidak bermanfaat seperti barang yang sudah rusak.

c) Bukan barang ghasab

Barang yang dijadikan mahar tidak boleh barang ghasab dalam artian mengambil barang orang lain tanpa izin walaupun berniat akan dikembalikan suatu hari nanti. Jadi barang harus murni milik sendiri, jika tidak maka tidak sah.[57]

d) Barang jelas

Barang yang diberikan hendaknya barang yang jelas keadaannya bukan barang yang tak terlihat atau barang yang tidak diketahui keberadaannya.

[57] Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996),70.

5) Macam-macam Mahar

Ulama ahli fiqih bersepakat bahwa macam-macam mahar dibagi menjadi dua, yakni

a) Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* adalah mahar yang sudah disebutkan besar dan kadarnya ketika akad nikah.[58] Suami wajib membayar mahar sesuai dengan kesepakatan dan penyebutan ketika akad nikah. Mahar *musamma* wajib dibayar penuh apabila suami telah menggauli istrinya.

Mahar *musamma* juga harus diberikan secara penuh apabila suami istri sudah menikah kemudian terdapat kerusakan atau adanya sebab khusus, seperti suami istri yang baru diketahui ternyata mahram. Dalam keadaan ini maka mahar harus diberikan secara keseluruhan. Adapun dalam keadaan cerai sebelum bercampur, ulama' bersepakat bahwa maharnya hanya wajib dibayar setengah.[59] Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT yakni

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ

[58] Mujid Abdul dkk, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1995), 185.
[59] Abdurrohman, *Fiqih Munakahat*, 84.

Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah di tangannya.[60]

b) Mahar *Mitsil*

Mahar *mitsil* yakni mahar yang tidak disebutkan pada saat sebelum atau saat terjadinya pernikahan atau mahar yang besarnya disamakan dengan orang terdekat, memperhatikan status sosial, kecantikan dan lain-lain.[61] Mahar *mitsil* dijelaskan dalam kitab fathul mu'in yakni mahar yang diharapkan perempuan yang sederajat dalam nasab dan sifat dari kalangan perempuan yang ashabnya sama. Mengukur mahar *mitsil* perempuan, pertama dilihat dari mahar ibu bapaknya, saudara perempuan sebapak dan seterusnya.[62]

Apabila terjadi pernikahan yang belum disepakati dan belum ditentukan maharnya atau pernikahan yang disepakati tanpa adanya mahar. Kemudian terjadi perceraian sebelum melakukan hubungan suami istri maka tidak ada hak bagi istri untuk mendapatkan mahar

[60] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, 38.
[61] Mujid Abdul dkk, *Kamus Istilah Fikih*, 185.
[62] Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, (Dar Ikhya'il Kutub Al-Arobiyah,), 63.

namun mendapatkan hak *mut'ah*.[63] Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi

لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ

Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut`ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.[64]

b. Mahar Menurut Hukum Positif

Agama menjadi acuan dalam melakukan perkawinan dan bersifat relevan untuk dijadikan pedoman hukum. Aturan agama dan keyakinan masyarakat menjadi kriteria untuk mengakui status pernikahan berdasarkan agama. Landasan yang dipakai dalam perkawinan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam Undang-undang disebutkan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum semua agama dan kepercayaan. Tentang diundangkannya Undang-undang Nomor

[63] Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, 41.
[64] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, 38.

1 Tahun 1974 Perkawinan tidak terlepas dari upaya negara, dalam hal ini pemerintah memberikan kepastian hukum bagi warga negara, khususnya umat beragama Islam. Undang-undang ini dibuat untuk menyelesaikan masalah perkawinan dan implikasi hukumnya bagi umat Islam. Berdasarkan penjelasan dari kasus diatas, perkawinan yang dipimpin oleh warga negara muslim setidaknya harus mengacu pada peraturan dan dipandu oleh mereka, hal itu diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974.[65] Mahar sebagai salah satu hak perempuan tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mahar diatur secara lengkap dalam Kompilasi Hukum Islam.

c. Mahar Menurut Kompilasi Hukum Islam

Mahar diatur secara lengkap dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam berisi pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fiqih yang biasa digunakan.

1) Pengertian Mahar

Kompilasi Hukum Islam, pengertian mahar tertuang dalam pasal 1 huruf d yang berbunyi:

"Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk uang,

[65] Abdul Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana,2012), 289.

barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam."

2) Hukum Pemberian Mahar

Adapun kewajiban pemberian mahar diatur dalam pasal 30 dan 34. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa calon suami diberi kewajiban memberi mahar kepada calon istri yang jumlah, jenis, dan bentuknya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Mahar merupakan pemberian wajib, tidak termasuk rukun perkawinan, sehingga kelalaian tidak menyebut mahar pada saat akad nikah berlangsung tidak mengakibatkan perkawinan tidak sah. Hal ini juga termasuk dalam keadaan mahar yang terhitung hutang.

Dalam pasal 35 dan 38 diatur mengenai terjadinya perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati. Pada pasal 35 dijelaskan bahwa:

a) Suami wajib membayar setengah dari mahar yang telah ditentukan dalam akad apabila mentalak istrinya sebelum berhubungan.
b) Akan tetapi ketika sebelum berhubungan suami meninggal dunia, maka istri mendapatkan mahar penuh sesuai yang ditetapkan.

c) Ketika terjadi perceraian sebelum berhubungan sedangkan jumlah mahar belum ditetapkan, maka mahar yang diberikan suami berupa mahar mitsil.

Adapun dalam Pasal 38 dijelaskan apabila mahar yang diberikan terdapat kecacatan, tetapi calon istri bersedia menerimanya tanpa syarat, maka mahar dianggap lunas. Akan tetapi jika istri menolak kecacatan tersebut, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar masih dianggap belum bayar.

Serah terima mahar diatur dalam pasal 33 yang berisi mahar yang telah diserahkan secara tunai dan telah diterima oleh mempelai wanita, maka ketika itu sudah menjadi hak pribadi wanita tersebut. Dengan persetujuan pengantin wanita, mahar dapat ditangguhkan seluruhnya atau sebagian. Adapun mahar yang belum diserahkan pada saat akad nikah berlangsung menjadi hutang bagi suami.

3) Bentuk dan Jenis Mahar

Mengenai bentuk dan jenis mahar diatur pada Pasal 31 yakni penentuan mahar berdasarkan kesepakatan

dari kedua belah pihak dan asas kesederhanaan serta kemudahan sesuai dalam ajaran Islam.

4. Nafkah

a. Nafkah menurut Hukum Islam

1) Pengertian

Nafkah adalah seseorang membelanjakan sesuatu untuk keluarganya.[66] Nafkah merupakan pemenuhan kebutuhan terhadap orang yang menjadi tanggungannya dalam makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain.[67] Biaya yang dikeluarkan seseorang untuk orang yang nafkahnya wajib atasnya baik berupa lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lain.[68] Ada pendapat yang menyatkan bahwa nafkah berasal dari kata *nafaqa* yang disamakan dengan *dzahaba*, *kharaja*, *nafida dan madha.*[69]Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan seseorang terlebih suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

2) Dasar Hukum

Ulama' bersepakat bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 disebutkan bahwa:

---

[66] Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, 234.
[67] Maharati Marfu'ah, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 9
[68] Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol 2, (Beirut: Dar al-Fikr,2008), 539.
[69] Abu al-Qasim al-Husain bin Muhammad, *al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr,t.t), 502.

وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ...

"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut."[70]

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ () لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.(6) Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang

[70] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, 37.

diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.[71]

Dari ayat diatas sudah jelas bahwa suami diberi kewajiban menafkahi dan memberikan pakaian secara patut. Patut yang dimaksudkan yakni tidak kekurangan dan tidak berlebihan dan disesuaikan dengan kemampuan suami. Dapat dipahami bahwa nafkah merupakan segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Pemberian nafkah tersebut berupa sandang, pangan dan papan.

3) Kadar Nafkah

Mengenai kadar jumlah nafkah tidak disebutkan secara spesifik karena besaran nafkah ditentukan berdasarkan kebutuhan keluarga dan kemampuan suami. Dalam al-Qur'an surat at-thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖۗ

"*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya*"[72]

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa nafkah tidak ditentukan jumlahnya, akan tetapi disesuaikan dengan

[71] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid,* 559.
[72] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid,* 559.

kemampuannya. Dalam hal besaran nafkah yang harus diberikan oleh suami, jumhur ulama berpendapat bahwa tidak ada jumlah pasti dalam pemberian nafkah. Nafkah diberikan menyesuaikan dengan kemampuan suami dan keadaan keluarga.

4) Kewajiban Nafkah

Mengenai waktu diwajibkannya suami memberi nafkah kepada istri, ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa diwajibkannya suami menafkahi istri setelah terjadinya akad ijab qabul. Setelah ada pernikahan yang sah, ijab qabul sudah dilangsungkan maka timbul kewajiban suami memberi nafkah untuk istrinya. Adapun pendapat yang lain menyatakan bahwa suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya ketika sudah melakukan jima', jadi walaupun suami dan istri telah resmi menikah dengan akad yang sah tetapi belum melakukan jima', suami belum ada kewajiban untuk menafkahi istrinya.

Suami memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Dalam islam tidak diberi batasan paling banyak atau paling sedikitnya suami memberikan nafkah kepada istri. Hal ini dimaksudkan agar suami tidak merasa kesusahan apabila harus memberi nafkah dengan jumlah besar terlebih ketika keadaan ekonomi keluarga

menurun. Maka nafkah dari setiap bulannya juga tidak harus sama.

b. Nafkah Menurut Hukum Positif

Hukum positif di Indonesia menyebutkan kewajiban nafkah yang terdapat dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 34 yang berbunyi: "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya." Perundang-undangan tidak mengatur secara khusus mengenai jumlah nafkah yang wajib diberikan suami kepada keluarganya.

c. Nafkah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, nafkah diatur pada pasal 80 tentang hak dan kewajiban suami istri. Pada pasal 80 ayat 2 dijelaskan bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Segala keperluan yang menjadi tanggung jawab suami disebutkan dalam ayat 4, yakni suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak. Kewajiban suami tersebut berlaku ketika sudah *tamkin* sempurna dari istrinya. Hal ini dijelaskan dalam ayat 5. Kiswah yang dimaksud pada ayat 4 adalah pakaian. Kiswah

termasuk hak istri, kiswah mencakup di dalamnya biaya pemeliharaan jasmaniah istri, biaya pemeliharaan kesehatan dan lain-lain.[73]

[73] Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Kelurga,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 176.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Penelitian empiris berupaya melihat perilaku hukum masyarakat dan bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.[74] Pada penelitian lapangan mengambil informasi dan data langsung kepada objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung kepada masyarakat Desa Kasembon Kecamatan Bululawang yang memiliki persepsi mahar sebagai patokan nafkah dalam keluarga.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang dilakukan peneliti dengan mengambil data langsung kepada informan baik secara tertulis, lisan maupun perilaku.[75] Adapun hasil dari data yang diperoleh bersifat deskriptif. Pada pendekatan kualitatif, penelitian dilakukan melalui proses wawancara kepada objek yang bersangkutan. Peneliti memahami apa yang dipahami subjek dan mencoba menjelaskan apa

[74] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: UNPAM Press, 2018), 62.
[75] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 32.

yang dijelaskan oleh subjek. Oleh karena itu peneliti menjelaskan dan menguraikan persepsi mahar sebagai patokan nafkah dalam keluarga.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Desa Kasembon Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Adapun yang melatarbelakangi pengambilan lokasi tersebut oleh peneliti karena dalam lokasi tersebut terdapat masyarakat yang memiliki persepsi persepsi mahar sebagai patokan nafkah dalam keluarga. Hal ini tidak dijumpai di lokasi yang lain sehingga peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai alasan dipertahankannya persepsi tersebut.

D. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber data yang utama. Adapun sumber data penelitian empiris diperoleh melalui data lapangan.[76] Data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara kepada masyarakat yang memiliki persepsi mengenai jumlah mahar sebagai patokan jumlah nafkah dalam keluarga. Informan yang menjadi sumber data primer adalah masyarakat Desa Kasembon Kecamatan Bululawang yang memiliki persepsi mahar sebagai patokan nafkah dalam keluarga.

[76] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89

Informan tersebut yakni Ibu TW berusia 38 tahun, Ibu R berusia 33 tahun, Ibu L berusia 30 tahun, Ibu Y berusia 50 tahun, Bapak A berusia 25 tahun, Bapak U berusia 47 tahun, Bapak AS berusia 53 tahun dan Bapak M berusia 59 tahun.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diambil sebagai rujukan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diambil Al-Qur'an dan hadits, buku-buku, serta beberapa literatur fiqih, Undang-Undang, skripsi dan jurnal penelitian terdahulu yang membahas tentang mahar pernikahan.

E. Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

a. Wawancara

Metode paling efektif yang digunakan dalam penelitian empiris yakni metode wawancara dimana peneliti mendapatkan data secara langsung dari informan. Oleh karena itu penulis menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data penelitian.[77] Proses wawancara dilakukan secara langsung dari masyarakat Desa Kasembon yang memiliki persepsi mahar sebagai patokan nafkah dalam keluarga.

[77] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 57.

b. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data yang ada melalui penelitian terdahulu maupun literatur lainnya. Penulis menggunakan metode ini guna mengetahui data-data terkait masyarakat yang bersangkutan. Dalam metode pengumpulan dokumentasi ini, peneliti akan mengumpulkan data melalui persamaan informasi penelitian terdahulu dan literatur yang berkaitan dengan tema penelitian yakni mahar sebagai patokan nafkah dalam keluarga.

F. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data ini merupakan langkah awal dari pengolahan data mengecek data-data yang didapatkan dari wawancara maupun dokumentasi. Edit data dimaksudkan untuk memeriksa kembali data yang diperoleh selama penelitian guna memperbaiki, menambah atau mengurangi data yang dibutuhkan. Peneliti memeriksa kembali data yang diperoleh dari masyarakat yang memiliki persepsi mahar sebagai patokan nafkah dalam keluarga.

b. Klasifikasi

Langkah yang diambil setelah *editing* yakni klasifikasi. Pada klasifikasi, data yang diperoleh disusun dan dikelompokkan guna mempermudah pengecekan data jika terdapat kesalahan

dalam penulisannya. Pada tahap ini peneliti akan memilih dan mengelompokkan setiap data yang telah didapat di lapangan.

c. Verifikasi

Verifikasi merupakan proses memeriksa data untuk memastikan data yang diperoleh akurat.[78] Peneliti melakukan verifikasi agar data yang diperoleh dapat diketahui kebasahannya. Di tahap ini langkah yang dapat dilakukan peneliti adalah meninjau kembali data yang diperoleh untuk dibandingkan. Dalam tahapan ini, peneliti akan memverifikasi data yang telah diperoleh yakni hasil wawancara dengan masyarakat yang memiliki pemahaman jumlah mahar sebagai patokan nafkah. Apabila terdapat ketidakjelasan atau kekurangan kelengkapan dapat diperjelas dengan rekaman yang diambil ketika wawancara langsung dengan informan.

d. Analisis

Proses penyederhanaan data yang diperoleh dalam sebuah penelitian. Proses penyederhanaan data dilakukan dengan cara menyederhanakan data kedalam bentuk kata yang mudah dipahami.[79] Dalam tahap ini peneliti akan berusaha menjawab faktor penyebab masyarakat memiliki persepsi mahar sebagai

[78] Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.
[79] Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2011), 263.

patokan nafkah dalam keluarga. Data yang sudah diperoleh dan sudah melewati langkah-langkan diatas dianalisis menggunakan teori yang ada. Peneliti akan menganalisis fakta yang terjadi pada masyarakat yang memiliki persepsi mahar sebagai patokan nafkah dalam keluarga teori living law.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah akhir dalam sebuah penelitian. Dalam kesimpulan, jawaban atas permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah penelitian akan dipaparkan. Pada kesimpulan ini peneliti akan memaparkan secara jelas dan ringkas mengenai gambaran persepsi mahar sebagai patokan nafkah dalam keluarga dan hasil dari analisis menggunakan teori *living law*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Kasembon Kecamatan Bululawang

1. Letak Geografis

Penelitian ini terletak di Desa Kasembon, secara geografis Desa Kasembon merupakan salah satu dari 14 desa yang ada di Kecamatan Bululawang. Letak geografis seluruh desa di Kecamatan Bululawang adalah dataran dengan topografi seluruh desa tergolong dataran. Luas kawasan Kecamatan Bululawang sekitar 49,36 km2 atau sekitar 1,66 persen dari total luas Kabupaten Malang. Desa Kasembon sendiri memiliki luas 371 ha dengan batas wilayah sebagai berikut[80]:

Utara : Desa Jambearjo

Selatan: Desa Kuwolu

Barat : Desa Pringu

Timur : Desa Krebet Senggrong

Desa Kasembon memiliki 5 RW dan 20 RT yang terdiri dari:

RW 1 : 6 RT

RW 2 : 5 RT

RW 3 : 5 RT

RW 4 : 2 RT

RW 5 : 2 RT

[80] Tim Penyusun, *Kecamatan Bululawang Dalam Angka 2020*, (Malang, BPS Kabupaten Malang: 2020), 3.

2. Jumlah Penduduk

Berdasarkan laporan data jumlah penduduk di Desa Kasembon pada tahun 2022 tercatat sebanyak 3921 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki berjumlah 1993 dan penduduk perempuan berjumlah 1928 jiwa.

Adapun jumlah penduduk menurut umur dapat diperinci sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Kasembon[81]

No	Usia	Laki-laki	Perempuan
1	0-11 Bulan	25	27
2	1-5 Tahun	149	132
3	6-12 Tahun	234	233
4	13-17 Tahun	150	145
5	18-25 Tahun	258	241
6	26-30 Tahun	135	127
7	31-40 Tahun	260	228
8	41-50 Tahun	279	269
9	51-74 Tahun	478	479
10	Lebih dari 75 Tahun	25	47
Jumlah		1993	1928

[81] Laporan Data Penduduk Desa Kasembon Berdasarkan Registrasi Penduduk

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan di Desa Kasembon terbilang tidak cukup tinggi, tidak sedikit masyarakat setelah lulus sekolah tingkat dasar memilih untuk menikah atau bekerja. Berikut data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Sesuai Tingkatan Pendidikan[82]

No	Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1.	Usia 3-6 belum masuk TK	55	56
2.	Usia 18-56 tidak pernah sekolah	27	89
3.	Usia 18-56 tidak tamat SD	101	147
4.	Tamat SD/sederajat	200	197
5.	Usia 12-56 tidak tamat SLTP	41	51
6.	Usia 12-56 tidak tamat SLTA	101	105
7.	Tamat SMP/sederajat	155	167
8.	Tamat SMA/sederajat	197	105
9.	Tamat D-1/sederajat	7	2
10.	Tamat S-1/sederajat	7	5
Jumlah Total		1815	

Adapun jumlah sarana pendidikan di Desa Kasembon sebagai berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Sarana Pendidikan[83]

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Pendidikan Kanak-Kanak	2

[82] Laporan Data Penduduk Desa Kasembon Berdasarkan Registrasi Penduduk
[83] Laporan Data Penduduk Desa Kasembon Berdasarkan Registrasi Penduduk

2.	Raudhatul Athfal	1
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	1
4	Madrasah Ibtidaiyah	2
5.	Sekolah Dasar	1
6.	Pondok Pesantren	2
Jumlah		9

Jika dilihat dari segi sosial pendidikannya, masyarakat desa kasembon terbilang kurang karena mayoritas masyarakat pendidikan tertinggi hanya sampai tingkat Sekolah Dasar. Masyarakat memilih bekerja atau menikah diusia mmereka yang remaja. Didesa memang menikah dengan tamat Sekolah Dasar merupakan hal yang sangat lumrah. Bahkan jika anak tamat SMA sederajat tidak langsung bekerja khususnya perempuan akan mendapat cibiran dari tetangga, jika tidak langsung menikah. Banyaknya remaja yang sudah menikah dengan pendidikan yang dibilang kurang, maka pengetahuan mereka juga kurang dari cukup. Banyak kendala yang menjadi faktor rendahnya pendidikan diantaranya, kurangnya biaya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan faktor lain disebabkan karena kurangnya kesadaran mengenai pendidikan, sehingga anak usia remaja sudah dituntut untuk bekerja membantu perekonomian keluarga.

4. Keadaan Ekonomi

Wilayah Desa Kasembon sebagian besar adalah sawah, oleh karena itu mata pencaharian penduduk paling banyak adalah sebagai petani

dan buruh tani. Sebagian masyarakat juga memiliki hewan ternak disetiap rumahnya, jadi tak jarang juga masyarakat bermtapencaharian sebagai peternak. Selain bermatapencaharian petani dan peternak, masyarakat ada yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, bidan swasta, buruh migran dan pedagang keliling. Adapun data penduduk Desa Kasembon berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Sesuai Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1.	Petani	435	200
2.	Buruh Tani	620	450
3.	Buruh Migran	3	12
4.	Pegawai Negeri Sipil	4	5
5.	Peternak	47	12
6.	Bidan Swasta	0	2
7.	Pedagang Keliling	24	11
8.	Guru Swasta	15	30
Jumlah		1870	

Mayoritas masyarakat Desa Kasembon bermatapencaharian sebagai petani dan buruh tani. Adapun fasilitas sarana kesehatan seperti posyandu terdapat 5 posyandu sesuai jumlah RW. Adapun fasilitas pasar yang ada di Desa Kasembon ada satu Pasar Hewan, untuk kebutuhan sayur shari-hari biasanya masyarakat membeli di

pedagang sayur keliling. Meskipun masyarakat memiliki profesi yang beragam, masih ada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan.

5. Keadaan Sosial Keagamaan

Mayoritas masyarakat Desa Kasembon pemeluk agama Islam. Masyarakat Desa Kasembon merupakan pemeluk agama Islam yang taat. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan mereka dalam kesehariannya yang selalu diwarnai oleh keadaan yang serba religius. Tokoh masyarakat atau pemuka agamalah yang memiliki peran paling dominan dalam kehidupan keagamaan. Bagi masyarakat, tokoh agama merupakan figur kharismatik yang menjadi panutan seluruh masyarakat. Walaupun demikian, masih ada masyarakat yang memiliki golongan berpemahaman tersendiri. Adapun fasilitas ibadah yang ada di Desa Kasembon yakni masjid yang berjumlah 4 dan musholla yang berjumlah 22 yang tiap beberapa rumah ada mushollah yang berdiri diantaranya.

B. Alasan Masyarakat Mempertahankan Persepsi Mahar Sebagai Patokan Nafkah Dalam Keluarga

Masyarakat memiliki persepsi berasumsi bahwa jumlah mahar yang ditetapkan menjadi patokan nafkah yang akan diberikan setelah pernikahan. Dipedesaan, masyarakat tidak mengenal istilah mahar, yang mereka ketahui adalah maskawin. Umur dan pendidikan bukan menjadi suatu pertimbangan untuk melakukan pernikahan. Tidak sedikit remaja

yang menikah sebelum menyelesaikan pendidikannya. Oleh karena itu, pernikahan dilaksanakan tanpa adanya ilmu pemahaman khususnya ilmu agama yang matang.

Praktik pernikahan dalam runtutan pra nikah yang pertama adalah pinangan. Pada tahap pinangan, keluarga pihak laki-laki mendatangi keluarga pihak perempuan dengan maksud dan tujuan untuk meminang perempuan yang akan dijadikan istri. Pihak perempuan akan memberikan jawaban persetujuan atau penolakan dengan mendatangi rumah laki-laki. Kemudian kedua belah pihak akan mengadakan musyawarah terkait waktu, tempat dan mahar yang akan ditentukan. Pada pernikahan di desa, biaya pernikahan ditanggung oleh masing-masing keluarga. Pihak laki-laki tidak diberi tanggung jawab untuk menanggung walimah pihak perempuan, jadi masing-masing keluarga menanggung biaya walimah mereka sendiri-sendiri.

Penentuan bentuk dan jumlah mahar biasanya bergantung dengan kesepakatan dua keluarga. Namun, ada juga yang menyerahkan langsung kepada pihak laki-laki dengan maksud agar pihak laki-laki tidak merasa keberatan dalam memberi mahar. Pihak laki-laki akan menentukan sesuai dengan kemampuannya. Beberapa masyarakat Desa Kasembon memiliki pemahaman yang sudah turun temurun tentang jumlah kadar mahar. Masyarakat memahami bahwa jumlah mahar sama dengan jumlah nafkah. Jumlah mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki nantinya akan menjadi patokan jumlah nafkah yang harus diberikan oleh suami untuk istrinya.

Pada bulan Agustus hingga bulan November 2021 terdapat dua puluh pasangan yang memilih untuk membatalkan pernikahannya. Hal ini dialami oleh masyarakat Desa Kasembon yang memiliki persepsi mahar sebagai patokan nafkah dalam keluarga. Batalnya pernikahan disebabkan karena pihak wali perempuan khawatir anaknya tidak diberi penghidupan yang layak jika mahar yang diberikan dinilai rendah. Penyebab lain pihak laki-laki merasa keberatan dengan jumlah mahar yang dipatok dinilai tinggi. Namun, dari banyaknya pasangan yang membatalkan pernikahannya tidak menjadikan persepsi tersebut dihilangkan atau tidak digunakan, masyarakat tetap menggunakannya hingga saat ini. Lantas apa alasan masyarakat mempertahankan hal tersebut?

Setelah dilakukan pengamatan dan wawancara kepada masyarakat Desa Kasembon yang memiliki persepsi mahar sebagai patokan nafkah dalam keluarga, terdapat beberapa alasan masyarakat mempertahankan persepsi mahar sebagai patokan nafkah dalam keluarga.

Ibu TW mengungkapkan bahwa alasan mempertahankan pemahaman tersebut karena sudah ada dari keturunannya ke atas, beliau mengikuti sebagaimana yang diwariskan oleh orang tua beserta kakeknya. Beliau juga mengungkapkan bahwa, suami akan merasa lebih bertanggung jawab kepada keluarga. Menurut Ibu TW, pihak laki-laki yang menolak jumlah mahar sebagai patokan nafkah, kebanyakan berasal dari desa lain. Kesepakatan tersebut harus disetujui oleh kedua belah pihak, jadi ketika laki-laki bukan dari desa sendiri tetap harus mengikuti pemahaman

tersebut. Menurut Ibu TW, ketika pihak laki-laki tidak menyetujui jumlah mahar yang djadikan patokan nafkah, maka mereka berhak untuk mendapatkan penolakan.

Adapun hasil wawancara dengan Ibu L, beliau mengungkapkan bahwa mempertahankan permahaman tersebut dengan maksud untuk mengikuti tradisi nenek moyang yang sudah turun temurun. Tujuan tradisi tersebut tidak lain untuk mensejahterakan keluarga karena kebutuhan akan selalu terpenuhi dan perekonomian terhitung stabil. Selain pemaparan diatas, Ibu L mengungkapkan bahwa adanya pemahaman tersebut sebagai tolak ukur keseriusan untuk membangun rumah tangga. Keseriusan tersebut dilihat dari kesanggupan suami untuk selalu berusaha mencukupi kebutuhan keluarga dengan memberikan nafkah dan penghidupan yang layak. Hal ini dilihat dari kewajiban suami untuk menafkahi keluarganya.

Ibu R mengungkapkan hal yang sama sebagaimana Ibu TW dan Ibu L. Mempertahankan pemahaman tersebut memberikan dampak yang baik, diantaranya perekonomian yang stabil dan adanya jeminan pemberian nafkah sehingga adanya kehidupan yang layak setelah pernikahan. Mempertahankan pemahaman tersebut juga termasuk bentuk pelestarian terhadap budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyng terdahulu. Pemahaman tersebut bersifat turun temurun dan mengikat bagi kedua belah pihak ketika kedua belah pihak berasal drai Desa Kasembon.

Penulis juga melakukan wawancara terhadap pihak laki-laki yang memiliki pemahaman jumlah mahar sebagai patokan nafkah. Penulis melakukan wawancara dari pihak laki-laki yakni kepada Bapak A dan Bapak U. Sama halnya yang diungkapkan oleh Ibu TW, Ibu L, Ibu R dan Ibu Y, beliau mengungkapkan bahwa pemahaman tersebut sudah ada sejak zaman nenek moyang. Menurut beliau masyarakat akan selalu menerapkan mengenai pemahaman tersebut karena memliki tujuan yang baik yakni kemaslahatan keluarga. Mengenai keberatan atau tidaknya dalam penentuan kesamaan jumlah mahar dengan nafkah, Bapak A mengungkapkan bahwa hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab dari calon suami. Laki-laki yang akan menikah sedangkan belum memiliki pekerjaan tetap akan mempertimbangkan kembali mengenai kesanggupan memberi nafkah setelah penikahan.

Adapun menurut Bapak U, pemahaman tersebut akan memberatkan jika pihak laki-laki berasal dari keluarga kurang mampu sedangkan pihak perempuan berasal dari keluarga berkecukupan. Hal ini dilihat ketika sudah berkeluarga, mengingat rezeki setiap keluarga akan berbeda-beda. Oleh karena itu, pihak laki-laki yang berasal dari desa lain akan mempertimbangkan kembali mengenai pemahaman tersebut. Pemahaman tersebut berlaku jika pihak laki-laki dan prempuan sama berasal dari Desa Kasembon. Apabila pihak perempuan dari Desa Kasemnon tetapi pihak lali-lski dari luar maka harrus mengikuti pemahaman tersebut. Namun, ketika yang berasal dari Desa Kasembon

pihak lsi-laki maka pihak perempuan tidak wajib mengikuti,pemahaman tersebut. Pihak laki-laki yang berasal dari keluarga berekonomi dibawah rata-rata akan memilih untuk membatalkan pernikahannya disebabkan kesepakatan nominal mahar yang dirasa terlalu tinggi. Beliau juga menimpali bahwa mempertahankan pemahaman tersebut sebagai bentuk melesarikan budaya dan dengan pemahaman tersebut memotivasi suami agar semangat untuk mencari nafkah.

Penulis juga mewawancarai masyarakat yang tidak mempertahankan pemahaman tersebut. Dalam hal ini, penulis mewawancarai Bapak AS, Bapak M dan Ibu Y. Hasil wawancara dengan Bapak M, beliau memilh tidak mempertahankan pemahaman tersebut karena berbeda dengan syariat. Pemberian mahar dan nafkah disesuaikan dengan kemampuan suami. Tidak boleh ada salahsatu pihak yang merasa keberatan atau terbebani. Ketika nafkah disamakan dengan jumlah mahar maka suami akan keberatan jika perekonomian keluarga waktu itu sedang menurun. Oleh karena itu lebih baik berpedoman kepada fiqih munakahat.

Adapun alasan Ibu Y tidak mempertahankan pemahaman tersebut karena tidak mau memberatkan suami. Melihat perekonomian keluarga yang tidak bisa dijamin apa akan naik terus atau adakalanya turun, lebih baik tidak mematok nafkah dengan junlah mahar yang dibayarkan. Sesuai dengan pedoman fiqih munakahat dimana pemberian mahar dan nafkah tergantung pada kemampuan suami.

Bapak AS selaku ketua Ranting Nahdlatul Ulama Desa Kasembon, beliau mengungkapkan:

> "*Menanggapi pemahaman tersebut, kami tidak semata menyalahkan atau membenarkan masyarakat yang memiliki pemahaman jumlah mahar sebagai patokan nafkah. Masyarakat memang memiliki pemahaman masing-masing dan kami tidak semata-mata melarang pemahaman tersebut jika pemahaman tersebut dikaitkan dengan konsep fiqih pernikahan. Memang dasar masyarakat disini kurang pemahaman agama karena ya mereka beragama islam tentunya dari faktor keturunan. Orang tua islam, ayah ibu islam otomatis anaknya juga islam. Jadi agama islam bukan dari kemauan mereka sendiri. Dari agama keturunan tersebut membuat mereka tidak mau belajar agama secara kaffah. Masyarakat memilih mempertahankan pemahaman tersebut karena pengetahuan tentang agama kurang dan belum lengkap. Pemahaman tersebut juga berasal dari nenek moyang yang memang dari dulu menggunakan adat kejawen. Memang di desa ini dari sisi pendidikannya kurang dan kurangnya minat untuk belajar agama. Walaupun disetiap daerah ada pendidikan yang bergerak dibidang agama tetapi fokus pengenalannya kepada masyarakat adalah cara membaca Al qur'an, belum sampai kepada hukum-hukum agama. Lembaga pendidikan agama yang ada sementara memang belum menyentuh mengenai hukum-hukum perkawinan. Walapun pemahaman tersebut ada secara turun temurun, maka pemahaman tersebut kurang dibenarkan menurut agama karena akan mempersulit salah satu pihak terutama calon pengantin laki-laki. Akan tetapi dalam persepsi tersebut juga memiliki dampak dan tujuan yang baik bagi kedua belah pihak. Ketika pemahaman tesebut tidak memberatkan bagi kedua belah pihak maka tidak akan menimbulkan masalah. Kami selalu berusaha untuk lebih mengenalkan kembali kepada masyarakat mengenai hukum-hukum islam. Hukum mengenai pernikahan akan diperkuat kembali khususnya masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan. Kami akan menambah pengetahuan tersebut mengenai kegiatan yang ada dimasyarakat seperti tahlilan dan kegiatan lain sepert yasinan, dibaan dan ketika di TPQ."*[84]

[84] Afif S, Wawancara, (Malang, 13 Februari 2022)

Hasil dari wawancara kepada masyarakat Desa Kasembon yang memiliki persepsi mahar sebagai patokan nafkah dalam keluarga, yakni. masyarakat memilih untuk mempertahankan pesepsi tersebut karena sudah ada sejak nenek moyang mereka, memotivasi suami untuk mencari nafkah dan jaminan kehidupan yang layak dengan perekonomian keluarga yang stabil. Adapun masyrakat yang tidak mempertahankan pemahaman tersebut memiliki alasan pemahaman tersebut tidak sesuai dengan keentuan syariat.

Melihat kondisi tersebut, penulis akan mengkaitkan perbedaan masyarakat yang mempertahankan dengan masyarakat yang tidak mempertahankan dari sisi pendidikan. Berikut table riwayat pendidikan informan.

Tabel 4.5
Riwayat Pendidikan Informan

No	Informan	Riwayat Pendidikan
1.	Ibu TW	Sekolah Dasar
2.	Ibu L	Sekolah Dasar
3.	Ibu R	Sekolah Dasar
4.	Ibu Y	Sekolah Menengah Keatas
5.	Bapak A	Sekolah Dasar
6.	Bapak U	Sekolah Dasar
7.	Bapak AS	Pasca Sarjana
8.	Bapak M	Sekolah Menengah Keatas

Jika dilihat dari riwayat pendidikan informan, informan yang memilih untuk mempertahankan pemahaman tersebut berlatarbelakang pendidikan yang cukup rendah, yaitu tamat Sekolah Dasar. Hal ini memungkinkan adanya kurang pengetahuan formal maupun agama. Tidak hanya informan, dari keseluruhan masyarakat Desa Kasembon, pendidikan mereka dominan tamat Sekolah Dasar. Kondisi ini sangat rentan terhadap pengetahuan ilmu yang kurang. Adapun informan yang mimilih meninggalkan pemahaman tersebut berlatar belakang pendidikan tingkat Sekolah Menengah Keatas dan Pasca Sarjana. Tingkat pendidikan mereka cukup tinggi menyebabkan mereka memilih untuk meninggalkan dengan alasan mengikuti syariat islam. Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa faktor lain yang menjadi sebab persepsi mahar sebagai patokan nafkah dipertahankan hingga saat ini adalah kurangnya ilmu pengetahuan masyarakat terkait hal tersebut.

C. Alasan Masyarakat mempertahankan Persepsi Mahar Sebagai Patokan Nafkah Dalam Keluarga Perspektif *The Living Law*

Desa Kasembon dikenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi adat istiadat jawa yang biasa disebut *kejawen.* Hal ini dibuktikan dengan kepercayaan mereka terhadap jumah weton. Sebelum meminang perempuan, masyarakat akan menghitung terlebih dahulu jumlah wetonnya. Begitupun dari pihak perempuan, mereka akan menghitung jumlah weton kemudian dijadikan pertimbangan untuk menerima atau

menolak laki-laki yang meminangnya. Masih banyak lagi adat *kejawen* yang berlaku dikalangan masyarakat.

Fenomena yang terjadi di Desa Kasembon setelah adanya diskusi terkait jumlah mahar yang akan ditentukan, terdapat beberapa kemungkinan. Pihak perempuan dengan latarbelakang perekonomian standar meminta mahar dengan jumlah standar kepada laki-laki yang juga termasuk latarbelakang perekonomian standar kemudian pihak laki-laki menyanggupi dengan nominal mahar tersebut, maka mereka bersepakat dengan jumlah mahar yang telah ditentukan. Jika pihak perempuan meminta mahar dengan jumlah tinggi kemudian pihak laki-laki yang memiliki latar belakang kurang mampu pihak laki-laki mau berusaha memberi nafkah sesuai permintaan, maka kesepakatan kedua belah pihak telah disetujui. Namun, jika perempuan yang memiliki perekonomian di atas rata-rata kemudian meminta mahar tinggi kepada laki-laki yang memiliki perekonomian standar kemudian laki-laki tersebut tidak menyetujuinya, maka kesepakatan kedua belah pihak tidak sah, pernikahan akan dibatalkan. Akan tetapi ada peninjauan kembeli ketika kedua belah pihak ingin mempertimbangkan hal tersebut. Peninjauan kembali mengenai negoisasi jumlah mahar dilakukan pada pertemuan kedua.

Persepsi mahar sebagai patokan nafkah dalam keluarga, tersebut seperti hukum yang sersifat mengikat tetapi tidak tertulis. Hal ini sesuai dengan teori Djojodigoeno, dalam dimensi hukum adat mengandung dua

dimensi, yaitu dimensi formal dan materiil. Dalam dimensi formal hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan dimensi materialnya hukum adat adalah sitem norma yang mengekspresikan perasaan keadilan masyarakat.[85]

Persepsi mahar sebagai patokan nafkah dalam keluarga berlaku ketika pihak perempuan dan pihak laki-laki sama-sama berasal dari Desa Kasembon. Adapun ketika pihak perempuan berasal dari Desa Kasembon sedangkan laki-laki berasal dari daerah lain, maka pihak laki-laki harus mengikuti persepsi yang ada di Desa Kasembon. Namun, ketika yang berasal dari Desa Kasembon adalah pihak laki-laki, maka tidak ada kewajiban untuk mengikuti persepsi tersebut.

Masyarakat yang keluarganya sudah terikat dengan persepsi tersebut memiliki kewajiban untuk menggunakan persepsi itu. Namun, tidak semua masyarakat yang menggunakan persepsi tersebut. Persepsi tersebut hanya terikat oleh masyarakat yang memang keluarganya sudah menganut dari zaman nenek moyang. Sedangkan masyarakat desa mayoritas penduduknya adalah keluarga sendiri dan hubungan kekeluargaan mereka sangat erat. Oleh karena itu tak jarang dalam 1 Rt termasuk dalam satu keluarga utuh.

Mayoritas masyarakat Desa Kasembon beragama Islam, dan kegiatan keagamaan juga terlihat baik, akan tetapi dalam praktik pemberian nafkah, masyarakat Desa Kasembon memiliki hukum sendiri

[85]Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia,* 18.

yang berdasar pada tradisi nenek moyang mereka. Menurut tokoh masyarakat yang ada suatu hukum itu bisa muncul dari suatu budaya, akan tetapi tidak semua budaya bisa menjadi hukum, selama budaya tersebut bisa mewujudkan tujuan hidup masyarakat yang mengutamakan kemashlahatan dan keadilan untuk semuanya, maka budaya tersebut bisa menjadi suatu patokan atau dasar hidup masyarakat.

Kebiasaan atau tradisi adalah sumber hukum yang tertua, di mana hukum dapat dikenal atau digali dari hukum di luar undang-undang. kebiasaan merupakan pola tingkah laku yang tetap, lazim, dan ajeg oleh masyarakat, atau bisa di sebut adat dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan kebiasaan masyarakat Desa Kasembon mengenai mahar dan nafkah sudah menjadi pedoman mereka . Hal ini sesuai dengan pedapat Hardjito Notopuro hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dan merupakan kebiasaan dengan ciri khas tersendiri dan menjadi pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.

Alasan masyarakat memilih untuk mempertahankan pesepsi tersebut karena sudah ada sejak nenek moyang mereka, memberikan motivasi bagi suami untuk mencari nafkah dan adanya jaminan pemberian nafkah yang layak. Persepsi yang sudah ada dari zaman nenek moyang diterapkan dan dipertahankan hingga saat ini. Tujuan mereka untuk melestarikan budaya yang ada sejak zaman nenek moyang mereka. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi kebiasaan yang terulang-ulang. Hal ini

sesuai dengan pendapat Sudikno Mertokusumo, yaitu kebiasaan yang bisa menjadi suatu hukum bukan dari unsur terulangnya suatu perilaku, akan tetapi dari kepatutan, keyakinan dari masyarakat itu sendiri.[86] Sebagaimana juga dijelaskan dalam satu Kaidah Ushul Fiqh,

العَادَّةُ الْمُحَكَّمَة

Artinya " Kebiasaan bisa dijadikan patokan hukum"[87]

Kaidah ini diambil dari realitas sosial masyarakat yang mana semua cara hidup dan kehidupan dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama, sehingga masyarakat memiliki pola hidup sendiri berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama.

Informan juga mengungkapkan bahwa alasan mempertahankan persepsi tersebut karena untuk memotivasi suami dalam mencari nafkah. Kesejahteraan pernikahan masyarakat Desa Kasembon, utamanya yang menggunakan persepsi mahar sebagai patokan nafkah dalam keluarga dilihat dari sifat kepemimpinannya dalam gigih untuk memberi nafkah yang teratur. Pemberian nafkah yang dipatok dengan mahar dapat dikaitkan dengan pendapat Imam Malik dan Imam Hanafi. Menurut Imam Malik minimal mahar yang harus diberikan adalah seperempat dinar, emas atau perak seberat tiga dirham.[88] Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat

[86]Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*,(Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), 13.
[87] Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Malang:UIN Maliki Press, 2010), 203.
[88] Miftahul Jannah, *"Mahar perkawinan dengan hafalan ayat al-Qur'an di tinjau dari fiqh munakahat"*(Under gradute skripsi, Universitas begeri raden fatah Palembang, 2016),

bahwa paling sedikitnya mahar yakni sepuluh dirham. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa perempuan berhak mendapatkan mahar yang layak.

Alasan selanjutnya adalah pemahaman tersebut menjadikan terjaminnya nafkah setelah menikah. Jaminan nafkah setelah menikah menjadikan perekonomian keluarga yang stabil, hal ini yang menjadikan masyarakat tetap mempertahankan persepsi tersebut. Jika melihat dari sisi pekerjaan informan sebagai mana dalam table berikut. Penulis akan mencoba mengkaitkan dengan jenis pekerjaan informan.

Tabel 4.6
Jenis Pekerjaan Informan

No	Informan	Jenis Pekerjaan
1.	Ibu TW	Buruh Pabrik
2.	Ibu L	BuruhTani
3.	Ibu R	Buruh Pabrik
4.	Ibu Y	Petani
5.	Bapak A	Petani
6.	Bapak U	Petani
7.	Bapak AS	Guru Swasta
8.	Bapak M	Wirausaha

Melihat kondisi perekonomian Desa Kasembon jika dilihat dari jenis pekerjaan, mayoritas masyarakat bermatapencaharian sebagai petani,

https://www.google.com/url?q=http://eprints.radenfatah.ac.id/948/1/SKRIPSI%2520MIFTAHUL%2520JANNAH%2520%252811140705%2529.pdf&usg=AOvVaw2ycQPdLofFjeqxX-R7_g3i&hl=in_ID

terutama informan. Kegigihan masyarakat untuk mempertahankan persepsi mahar sebagai patokan nafkah dalam keluarga juga sangat tinggi karena mereka termasuk masyarakat agraris dimana kawasan Desa Kasembon banyak digunakan sebagai lahan pertanian, sehingga masyarakat bermatapencaharian sebagai petani. Hal ini menjadikan mereka tidak dalam transaksi apapun dengan dunia luar.

Penghasilan seorang petani jika diukur dengan kebutuhan sehari-hari di desa terbilang mencukupi. Masyarakat Desa Kasembon juga tidak meminta mahar yang terlalu besar. Adapun masyarakat yang tidak mempertahankan persepsi tersebut dengan alasan tidak ingin memberatkan suami dan lebih memilih mengikuti syariat islam. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan Ibu Y dan Bapak M, mereka tidak ingin membuat pihak laki-laki merasa keberatan dengan jumlah mahar. Melihat masyarakat Indonesia mayoritas mengikuti madzhab Imam Syafi'i, perempuan sebaiknya tidak mematok mahar dengan nilai tinggi yang dapat mempersulit laki-laki yang akan menikahinya. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW, yakni

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم خير لصداق ايسره[89]

Artinya : "Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah"

[89] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al-uratu wa ahkamuha fii al-Tasyri' al-islami*, Penerjemah Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2011), 179

Pemberian nafkah juga disesuaikan dengan kesanggupan suami. Hal ini sesuai dengan dasar kewajiban pemberian nafkah terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

Artinya : Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kadar kesanggupannya.

Suami diberi kewajiban memberi nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuan suami, bukan diberi tuntutan jumlah nafkah yang dipatokan dengan mahar yang telah diberikan. Masyarakat Desa Kasembon yang melaksanakan persepsi tersebut sebagai bentuk melestarikan tradisi dari nenek moyang mereka. Masyarakat mempertahankan persepsi tersebut tidak lain untuk mewujudkan kemaslahatan dalam berkeluarga. Sehingga mereka menjadikan persepsi tersebut sebagai budaya. Kebudayaan sendiri merupakan hasil dari karya, cipta, dan rasa manusia yang hidup bersama.[90] Betapapun sederhananya masyarakat secara pasti memiliki nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah. Tiap masyarakat, atau tiap rakyat mempunyai budaya yang berbeda-beda. Melihat dari realitas sosial masyarakat yang mana semua cara hidup dan kehidupan dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama, sehingga masyarakat memiliki pola hidup sendiri berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama. Sebagaimana masyarakat Desa Kasembon,

[90] Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, 12.

ada yang memilih mempertahankan warisan nenek moyang mereka dana pula yang memilih meninggalkan warisan tersebut dan berpedoman kepada syariat islam.

Merujuk pada jurnal yang ditulis oleh Miftahuddin Azmi, M. HI, beliau mengungkapkan bahwa Raymond Williams mendefinisikan budaya dalam tiga ruang. Salahsatunya adalah budaya bisa berarti pandangan hidup tertentu dari masyarakat, periode atau kelompok tertentu.[91] maka hal ini sangat cocok dengan persepsi masyarakat di Desa Kasembon. Persepsi tersebut tidak diterapkan oleh masyarakat secara keseluruhan. Namun pemahaman tersebut diterapkan dan diyakini oleh masyarakat yang memiliki kelompok tertentu. Budaya juga berperan penting dalam sejarah hukum Islam, oleh karena itu kita tidak bisa semata-mata meminta untuk memberhentikan pemahaman tersebut dengan alasan nash tidak menyebutkan.

Penulis mengamati pengaruh masyarakat menerapkan persepsi jumlah mahar sebagai patokan nafkah hingga saat ini yakni pengetahuan masyarakat yang kurang. Masyarakat banyak yang memilih untuk bekerja daripada melanjukan pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini memungkinkan kurangnya pengetahuan serta ilmu agama. Agama islam yang merupakan agama keturunan menjadikan masyarakat tidak mempelajarinya secara utuh. Kurangnya minat untuk belajar dan mempelajari ilmu juga menjadi

[91] Miftahuddin Azmi, "Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 13.1 (2010), 53–78 <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/169>., "Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya, 7

faktor minimnya pengetahuan masyarakat. Mata pencaharian masyarakat yang menjadi hasil utama pemasukan ekonomi keluarga juga menjadi pengaruh ketika jumlah pengeluaran dan pemasukan tidak seimbang.

Masyarakat Desa Kasembon, bukanlah berdasar pada hukum yang mandiri, ataupun paksaan dari negara atau penguasa, akan tetapi masih berdasar pada budaya yang berkembang di masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori Carl von Savigny, madzhab sejarah dan kebudayaan dalam pandangannya mengatakan, *Das Recht wird nicht gemacht, est und wirt mit dem volke*[92]yaitu hukum itu tidak dibuat-buat, akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat sebagai *living law*. Oleh karena itu, hukum yang baik adalah hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat, serta menjadi pedoman bagi anggota masyarakatnya. Teori Savigny ini dikembangkan oleh Soepomo dengan mengambil hukum adat sebagai acuan atau standar. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat serta bersifat dinamis dan tumbuh berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat.[93]

[92]Lili Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filasafat dan Teori Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), 65.
[93] Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*,8.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai persepsi masyarakat jumlah mahar sebagai patokan nafkah dalam keluarga, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Alasan masyarakat Desa Kasembon mempertahankan persepsi mahar sebagai patokan nafkah dalam keluarga adalah persepsi tersebut sudah menjadi tradisi dan budaya dari zaman nenek moyang mereka, memotivasi suami untuk mencari nafkah dan agar adanya jaminan nafkah sehingga menjadikan perekonomian yang stabil. Faktor lain yakni kurangnya ilmu pengetahuan khususnya ilmu agama. Adapun masyarakat yang tidak mempertahankan persepsi tersebut dengan alasan tidak ingin memberatkan salahsatu pihak dan mereka lebih memilih berpedoman pada syariat islam.
2. Hukum yang hidup di Desa Kasembon yaitu praktik dari persepsi mahar sebagai patokan nafkah dalam keluarga pada hakikatnya tidak muncul dengan sendirinya, akan tetapi ada berdasarkan budaya dari nenek moyang yang berlaku secara turun temurun. hal ini sesuai dengan teori *The living law* yang merupakan aturan-aturan yang digunakan di dalam hubungan-hubungan kehidupan yang sedang berlangsung dan bersumber dari adat istiadat atau kebiasaan. Hukum bukanlah sesuatu yang diciptakan, akan tetapi tumbuh dan berkembang

bersama masyarakatnya. Adapun masyarakatyang memilih tidak mempertahankan persepsi tersebut juga berpedoman sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

B. Saran

Berikut beberapa saran untuk berbagai pihak yang terkait:

1. Saran untuk masyarakat perlu dipahami bahwa tidak ada larangan untuk mengikuti pemahaman secara turun temurun. Namun ada baiknya jika pemahaman tersebut dikaji kembali menggunakan hukum Islam. Sehingga adanya pernikahan tidak menyebabkan kedua belah pihak merasa dirugikan. Untuk calon pengantin sebaiknya menyiapkan secara matang sebelum melakukan pernikahan. Belajar lebih banyak lagi pengetahuan khususnya ilmu agama karena akan menjadi pondasi agar terwujudnya keluarga sakinah.
2. Saran untuk tokoh masyarakat yakni menambah pengetahuan ilmu agama kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang ada. Sehingga masyarakat lebih mengetahui hukum-hukum yang berlaku. Menambah wawasan ilmu pengetahuan kepada pendidikan dasar dengan menambah didalamnya ilmu-ilmu agama sebagai bekal anak-anak atau remaja untuk menjalankan kehidupan sesuai syari’at.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*. Bandung: Sy9ma Creative Media Corp, 2014.

Buku

A Partanto, Pius dan M Dahlan Al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 1994.

Ahmad, Beni. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia: 2013.

Ahmad, Imam Abu Abdurrahman bin Syuaib bin Ali An Nasai. *Sunan An Nasai*. Depok: Gema Insani, 2017.

Al-Bukhary, *Shahih al-Bukhary*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1990.

al-Husain bin Muhammad, Abu al-Qasim. *al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr,t.t.

al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh.* vol 9. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.

Ansory, Isnan. *Fiqih Mahar*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.

Aziz Muhammad Azzam, Abdul dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Al-uratu wa ahkamuha fii al-Tasyri' al-islami* Penerjemah Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah, 2011.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM Press, 2018.

Bashri, Rusydaya. *Fiqh Munakahat 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: CV Kaaffah Learning Center, 2019.

Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Dr. M. Dahlan R. *Fikih Munakahat.* Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat.* Jakarta : Prenadamedia, 2003.

Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Kelurga.* Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Hasby Ash Shiddiqy, Muhammad. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Ibnu Qudamah, Syaikh Muwafiquddin. *Al-Mughni Jilid 6*. (Beirut: Dar Alamul Kutub, 1997.

Lukito, Ratno. *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta:Penerbit Teras, 2008.

Ma'luf, Louis. *al munjid fi al lughoh wa al a'lam*. Beirut: Dar al Masyriq, 1987.

Marfu'ah, Maharati. *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survai.* Jakarta: Pustaka LP3ES, 2011.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.

Mughniyyah Muhammad, Jawad. *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera Basritama, 2004.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum.* Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad Hasby Ash Shiddieqy, Teungku. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Muhammad, Bagir. *Fiqih Praktis II Menurut Al-Qur'an As Sunnah dan Pendapat Para Ulama'*. Jakarta: Karisma, 2009.

Mujid, Abdul dkk. *Kamus Istilah Fikih*. Jakarta:Pustaka Firdaus, 1995.

Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Pernikahan.* Jakarta: Bulan Bintang, 1998.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam.* Tangerang: Tira Smart, 2019.

Rahman Aljazairi, Abdur. *Al Fiqh Madzahib Al Arba'ah Juz 4*. Bairut: Darul Fikr: 2011.

Rahman, Abdul. *Perkawinan Dalam Syariat Islam.* Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012.

Rasyidi, Lili dan Ira Thania Rasyidi. *Dasar-Dasar Filasafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah Al Muqtashid Juz 2*. Semarang: Toha Putra.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Ummul Quro, 2014.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah. Terjemah: Moh Thalib*. Bandung: Alma Arif, 1990.

Saudjana, Nana dan Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.

Shomad, Abdul. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.

Sudiyat, Imam. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1991.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Tamrin, Dahlan. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*,(Malang:UIN Maliki Press, 2010).

Tim Penyusun. Kecamatan Bululawang Dalam Angka 2020. Malang: BPS Kabupaten Malang, 2020.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung:PT. Refika Aditama, 2010.

Yahya bin Syaraf an-Nawawi. *al-Minhaj Syarah Shahih Muslim bin al-Hajjaj*. Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2012 .

Zainuddin bin Abdul Aziz. *Fathul Mu'in*. t.tp.: Dar Ikhya'il Kutub Al-Arobiyah, t.t

Zuhaily, Muhammad. *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Madzhab Syafi'i. terj. Mohammad Kholiso*. Surabaya: CV. Imtiyaz, 2013.

Jurnal dan Skripsi

Azmi, Miftahuddin, "Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 13.1 (2010), 53–78 <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/169>

Khatimah, Husnul. *Implikasi Pembatalan Khitbah Terhadap Mahar "Mee Ranup" Perspektif Fiqh (Studi di Desa Cot Jabet Kc. Banda Baro Kab. Aceh Utara)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015. http://ethesis.uin-malang.ac.id/10486/

M Solekhudin Al-Ayubi. *Tradisi Belis Dalam Mahar Ditinjau Fiqh Syafi'i I (Studi Di Kota Wikabubak Kabupaten Sumba Barat)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. http://ethesis.uin-malang.ac.id/12927/

Medi Ardiyansyah. *"Konsep Mahar Dalam Pandangan Masyarakat Kota Sulubussalam (Studi Kasus Di Kecamatan Simpang Kiri)"*. Jurnal Taushiyah FAI UINSU no.1, 2021 https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tsh/article/donload/3991/2890

Miftahul Jannah. "Mahar perkawinan dengan hafalan ayat al-Qur'an di tinjau dari fiqh munakahat"Undergradute skripsi, Universitas begeri raden fatah Palembang, 2016). https://www.google.com/url?q=http://eprints.radenfatah.ac.id/948/1/SKRIPSI%2520MIFTAHUL%2520JANNAH%2520%252811140705%2529.pdf&usg=AOvVaw2ycQPdLofFjeqxX-R7_g3i&hl=in_ID

Muhajir, Ahmad. *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi Doi' Panai' dalam pernikahan adat suku Makassar Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi di Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. http://ethesis.uin-malang.ac.id/9371/

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI WAWANCARA





Foto bersama masyarakat & Tokoh masyarakat





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: Tazkia Nur Azalia
NIM	: 18210179
Tempat, Tanggal Lahir	: Malang, 22 Maret 2000
Fakultas/Program Studi	: Syariah/Hukum Keluarga Islam
Alamat	: Jl. Mawar 46 Rt.12 Rw.03 Dusun Krajan Desa Kasembon Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang
Nomor Telepon	: 085717342144
Email	: tazkiazali@gmail.com

Pendidikan Formal

2004-2006	: TK Al-Hidayah Kasembon
2006-2012	: MI Al-Hidayah Kasembon
2012-2015	: MTs. Al Ma'arif 01 Singosari
2015-2018	: MA Al Ma'arif Singosari

Pendidikan Non Formal

2012-2018	: PPQ. Nurul Huda Singosari
2018-2019	: Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2019-Sekarang	: Pondok Pesanten Sabilurrosyad Gasek Malang